

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KOTA SEMARANG**

Tesis

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat S-2**

**Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Konsentrasi Magister Administrasi Publik**



Disusun Oleh :

**ABDUL KADIR KARDING
D4E000002**

**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2008**

Lembar Pengesahan :

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KOTA SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

NAMA : ABDUL KADIR KARDING
NIM : D4E.000.002

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : September 2008

Susunan Tim Penguji

Ketua Penguji / Pembimbing I

Anggota Dewan Penguji

Drs. Wahyu Pujoyono, SU
NIP. 130 227 811

1. **Prof. Drs.Y. Warella, MPA, PhD**
NIP. 130 227 811

Sekretaris Penguji / Pembimbing II

Drs. Hardi Warsono, MTP
NIP. 130 227 811

2. **Dra. M. Suryaningsih, MS**
NIP. 130 227 811

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister Sain

Tanggal September 2008
Ketua Program Studi MAP
Program Pasca Sarjana
Universitas Diponegoro Semarang

Prof. Drs.Y. Warella, MPA, PhD
NIP. 130 227 811

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KOTA SEMARANG**

Diajukan oleh :

N A M A : ABDUL KADIR KARDING
N I M : D4E.000002

Telah disetujui
Pada tanggal : September 2008

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

**Drs. WAHYU PUDJOYONO, SU
MTP**

Drs. HARDI WARSONO,

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, September 2008

ABDUL KADIR KARDING

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Dzat Illahi Robby atas Ridlo-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul ***EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA SEMARANG***. Tugas tersebut untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Magister Administrasi Publik. Meskipun penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangannya. Oleh karena itu penulis membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif.

Penulis telah mendapat bantuan, baik secara moral maupun material dari berbagai pihak selama penyusunan tesis ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Yth :

1. Prof. Drs.Y. WARELLA, MPA, PhD selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang dan juga selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi perbaikan penulisan tesis ini.
2. Drs. Wahyu Pujoyono, SU selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahnya sehingga tesis ini selesai dengan baik.

3. Drs. Hardi Warsono, MTP selaku Dosen Pembimbing Kedua yang juga telah memberikan bimbingan dan masukannya demi selesainya penulisan tesis ini.
4. Dra. M. Suryaningsih, MS selaku Anggota Dosen Penguji yang telah memberikan saran-sarannya bagi perbaikan tesis yang kami susun.
5. Seluruh Dosen Pengampu Mata Kuliah di lingkungan Program Magister Administrasi Publik yang telah memberikan tambahan pengetahuan semoga menjadi bekal dalam meraih masa depan yang lebih baik.
6. Segenap Staf Sekretariat Program Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro yang memberikan berbagai bantuan dan kemudahan demi terselesaikannya pendidikan penulis.
7. Bapak H. Karding serta Ibu Hj. Nurjannah di Palu yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kasing sayang, Doa dan restunya penulis harapkan selalu.
8. Keluarga tercinta, Istriku tersayang Desiani Puspitaningtyas, Spi, MM, Anakku Ahnaf Mappidalle Iman Syahrozad Karding, Chaidir Sheva Ahmad Syah Lapandrita Karding, yang senantiasa sabar, mendukung dan memotivasi saya untuk menyelesaikan studi S2 ini.
9. Adik-adik ku yang kusayangi, Kaharuddin, Mansyur, Ernawati, Mahyudin yang telah memberikan dukungan dan doanya.
10. Jajaran pengurus DPW PKB JATENG, Fuad Hidayat, Sukirman, Rosidah serta pengurus-pengurus lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang memberikan dukungannya untuk menyelesaikan studi ini.

11. Segenap pihak yang belum disebutkan di atas yang juga telah memberikan bantuan kepada penulis baik langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, September 2008

Penulis

Abdul Kadir Karding

ABSTRAKSI

Abdul Kadir Karding , 2008, Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP. Negeri di Kota Semarang

Kata kunci : BOS, Akses pendidikan, kemiskinan ;

Program BOS dilatarbelakangi oleh kenaikan harga BBM yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat yang berdampak negatif terhadap akses masyarakat miskin terhadap Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Sesuai UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan Pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.” Dalam evaluasi Program BOS ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar cakupan dana BOS dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi siswa/siswi keluarga miskin dan tidak mampu dan bagaimanakah dampak pelaksanaan program BOS terhadap sekolah maupun masyarakat. Metode evaluasi deskriptif kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif .

Hasil evaluasi telah mengungkapkan bahwa pelaksanaan BOS tahun 2007 untuk SMP.Negeri telah dilaksanakan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa catatan yakni ; Hasil penelitian mengungkapkan BOS tahun 2007 untuk 41 SMP Negeri Sebesar Rp. 22.134.027.000 dari jumlah tersebut (30%) untuk pembayaran tenaga honorer /GTT/ PTT, Tenaga Harlep, (25%) untuk belanja barang jasa dan (20%) untuk kegiatan belajar mengajar, (15%) kegiatan kesiswaan dan (10%) dan pemeliharaan gedung. Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban BOS dan Realisasi RAPBS tahun 2007, ternyata kontribusi BOS sangat signifikan yakni 31 %, orang tua/wali murid 42 % dan APBD Kota Semarang sebesar 27 %. Cakupan BOS terhadap layanan siswa miskin berkisar 20 % - 33%. Dari totalitas siswa miskin baru dapat terlayani 20% - 25% hal ini disebabkan BOS belum dapat menjangkau seluruh siswa miskin. Cakupan BOS terhadap layanan siswa tidak mampu dari total siswa 32.102 siswa masih sekitar 8% atau 2.386 siswa tidak mampu. atau 1365 siswa yang memperoleh layanan atau sekitar 57% sisanya 1021 anak atau sekitar 43% belum mendapatkan layanan pendidikan pihak sekolah. Potensi BOS ternyata belum menjangkau semua siswa miskin /tidak mampu untuk memperoleh layanan pendidikan secara memadai. Dampak BOS ternyata dapat *memperkuat kemampuan sekolah* dalam memberikan materi pembelajaran dan kegiatan tambahan kepada siswa. Oleh karena itu beberapa komponen yang semula dibebankan orang tua siswa melalui SPP menjadi berkurang, adanya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana pendidikan, beban biaya sekolah menjadi lebih berkurang, dapat dirasakan masyarakat akan dapat mengurangi anak putus sekolah. Hambatan pelaksanaan BOS antara lain Pencairan BOS sering terlambat, hal ini menjadi mengganggu kegiatan belajar mengajar. Rekomendasi antara lain, Searah tujuan BOS hendaknya pemanfaatan dana BOS benar-benar diarahkan untuk operasional sekolah yang menunjang kelancaran proses belajar, sumber dana sekolah berasal dari APBD, BOS dan Sumbangan orang tua siswa, ketiga komponen ternyata sumbangan orang tua murid paling dominan. Keberadaan BOS tetap dipertahankan. Jumlah anggaran perlu ditingkatkan dan serta realisasi pencairan dana BOS yang dilakukan tiap triwulan dan pencairannya diawal bulan harus dapat terwujud, Hal ini dimaksudkan agar efektif. Agar sasaran BOS tercapai secara efektif yaitu memberikan akses bagi siswa keluarga miskin maupun siswa keluarga tidak mampu mendapatkan layanan pendidikan dasar yang bermutu, sudah seharusnya untuk melakukan seleksi secara transparan bagi siswa miskin/tidak mampu dengan membentuk tim kecil yang melakukan tugas melakukan pengecekan kondisi siswa yang sebenarnya di lapangan disamping berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kelurahan

ABSTRACT

Abdul Kadir Karding, 2008, Evaluation of Operational Assistance Program Implementation Public Junior High School (BOS) on Semarang

Keywords : BOS, Education access, poverty;

BOS program background was by increasing BBM price which made the decreasing of society purchase power and have negative effect to poor society access to Nine Years Elementary School. According to Legislation No. 20, 2003 concerning National Education System which ordering that "Every citizen have the same authority to get qualified education and Government must give the service and facility also assure of qualified implementation education for any citizen with no discrimination." In this BOS program evaluation be intended to found how much BOS fund coverage in order to increasing education access for poor family and unable students and how the effect of BOS program implementation both to school and society. Qualitative descriptive evaluation method which supported by quantitative data. Evaluation result conclude that BOS implementation on 2007 for Public Junior High School already done properly even though still consist some reports are ;Research result BOS, 2007 for 41 Public Junior High School Rp. 22.134.027.000 from that amount (30%) for honorary personnel payment/ GTT/PTT, Harlep personnel, (25%) for service material expense (20%) for learning activities, (15%) student activities and (10%) building maintenance. According to BOS responsibility report and Realization of RAPBS 2007, in fact BOS contributions very significant that was 31%, parents/ student guardian 42% and APBD of Semarang about 27%. BOS coverage to poor students about 20% -33%. From totality of new student could served 20% - 25%, this is because BOS could not reach all of poor student. BOS coverage of poor student served from total student 32.103 about 8% or 2.386 poor students, or 1365 student get served while about 57 student and the others 1021 about 43% not get service yet from school. BOS potencies in fact could not reach the poor student yet to get education service properly. In fact, BOS effect could *strengthened school ability* and give study material and addition activities to the student. Therefore some components that initially charged to parent trough SPP become less, presence the quantity development and qualified education tool, school expense become decreased, feel that society will be able to reduce the break school student. Barrier of BOS implementation are BOS distribution often late, therefore it was intrude on learning activities. Recommendation BOS clockwise the BOS fund exploitation should totally directed to school operational for learning process fluency, fund resources from APBD, BOS and contribution of parents, from third component the contribution of student parent was most dominant. Existence BOS still defensible. Budget amount need to increase and realization of BOS fund which executed every quarter and liquefaction in first month should materialized, this mattes intended to be effective. In order to reach BOS effectively that is by giving the access to poor student in order to get the service of qualified elementary school, it must be that in order to carry out the selection transparently for poor/unable students by built the small group which executed assignment to check the truly student condition in field while based on explanation letter from village chief.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
ABSTRACT	vi
PERNYATAAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian	17
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	
Pengertian Evaluasi Program dan Program	18
Dimensi dan Tahapan Evaluasi	22
Tujuan Evaluasi Program	26
Model Evaluasi Program	28
BAB. III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Fokus Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	39
D. Instrumen Penelitian	39
E. Pemilihan Informan	40

F. Sumber Data	41
G. Teknik Pengumpulan Data	41
H. Populasi dan Sampel	44
I. Analisis Data	45
BAB. IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM PROGRAM BOS	
A. Diskripsi Lokasi Penelitian	47
B. Gambaran Umum Program BOS	57
BAB. V HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN PROGRAM BOS	
A. Data dan Interpretasi	77
1. Cakupan dana BOS bagi siswa keluarga miskin	78
2. Cakupan dana BOS bagi siswa keluarga tidak mampu	86
3. Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Program BOS	92
4. Potensi BOS dalam Perluasan Akses Pendidikan	100
B. Diskusi.....	105
BAB. VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	116
B. Rekomendasi	126
Lampiran-lampiran	-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu indikator kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah tingkat capaian pembangunan Sumber Daya Manusianya, bahkan pendidikan menjadi domain utama bagi setiap negara yang ingin maju dan ingin menguasai teknologi. Setiap negara mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsanya tanpa terkecuali, Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia .

Visi Pendidikan Nasional adalah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab segala tantangan

zaman yang selalu berubah. Adapun langkah-langkah kebijakan yang diambil Pemerintah dalam mewujudkan visi tersebut antara lain;

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia,
2. Meningkatkan mutu pendidikan yang mempunyai daya saing tingkat nasional, regional maupun internasional,
3. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global,
4. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini, mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral,
5. Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan,
6. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Searah dengan tujuan pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan langkah-langkah reformasi atau menyempurnakan sistem pendidikan yang meliputi : (1) Penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, dimana dalam proses tersebut harus ada pendidikan yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan serta

mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik sehingga terjadi pergeseran paradigma proses pendidikan dari paradigma pengajaran ke-paradigma pembelajaran, Paradigma pengajaran yang menitikberatkan peran pendidik dalam menstranformasi pengetahuan bergeser ke-paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya, (2) Perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumberdaya pembangunan menjadi paradigma manusia sebagai subyek pembangunan secara utuh.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, sampai saat ini Pemerintah masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal, seperti tingkat kualitas pendidik yang belum memenuhi standar mutu, sarana-prasarana sekolah yang masih kurang memadai serta terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, selain faktor internal tantangan yang paling berat bagi bangsa Indonesia pada era globalisasi pada abad ke- 21 ini adalah bagaimana menyiapkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing. Hanya dengan bermodalkan manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing suatu bangsa akan mampu bermitra dan berkompetisi pada tataran global. Pada hal kita tahu bahwa gambaran umum mutu Sumber Daya Manusia Indonesia sebagaimana dilaporkan oleh UNDP setiap tahun

menunjukkan tingkat pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia ternyata masih memprihatinkan, demikian juga peringkat Indeks Pertumbuhan Daya saing Indonesia masih sangat rendah belum sesuai yang kita harapkan, kondisi ini adalah sebuah realitas yang menjadi isyarat bahwa pemerintah dan masyarakat Indonesia harus bekerja keras secara terus menerus dan konsisten meningkatkan mutu pendidikan manusia dengan menempatkan pendidikan sebagai salah satu wahana dalam pembangunan manusia Indonesia yang cerdas, unggul dan berdaya saing.

Secara makro menurut Umar Juoro bahwa posisi Indonesia dalam *Global Competitiveness Report 2005* masih sangat memprihatinkan :

1. Diantara 102 negara, Indonesia menduduki urutan ke 66 dalam Indeks Daya saing Pertumbuhan (Malaysia No. 27 dan Thailand No. 31). Komponennya: Indeks Teknologi; Indeks lembaga publik; Indeks Lingkungan Ekonomi Makro.
2. Diantara 120 negara, Indonesia menduduki urutan ke 58 dalam Indeks Daya Saing Ekonomi Mikro (Malaysia No. 26 dan Thailand No. 35). Komponennya: Indeks operasi dan strategi perusahaan; Indeks kualitas lingkungan bisnis (Prosending, Menpan, 2006)

Sedang dari aspek *Indeks Human Development*, Indonesia berada jauh di bawah Vietnam dan untuk urutan negara terkorup Indonesia berada pada posisi yang sangat memprihatinkan.

Upaya pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Indonesia telah ditempuh melalui berbagai strategi, akan tetapi hasil pembangunan pendidikan Indonesia sampai saat ini masih menjadi “catatan merah” Indikator berdasarkan indeks kinerja Pembangunan Manusia masih cukup memprihatinkan, terpuruknya kondisi *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2004 menempati peringkat 110 dari 173 negara. Hal ini berarti bahwa Indonesia tertinggal jauh di bawah negara ASEAN lainnya seperti Negara Malaysia (59), Negara Thailand (70) dan Negara Philipina (77), bahkan peringkat negara kita berada di bawah Vietnam, sebuah negara yang baru bangkit dari porak poranda akibat perang berkepanjangan (dari UNESCO : 2004). Indikator rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia di atas, membuat keprihatinan bagi Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan mutu pendidikan di Indonesia. Sebab penilaian *Human Development Index (HDI)* yang diukur dengan indikator-indikator antara lain, (1) Penilaian terhadap rata-rata usia harapan hidup, (2) Tingkat keaksaraan atau melek huruf, (3) Lama menempuh pendidikan dan (4) kemampuan daya

beli masyarakat atau pengeluaran perkapita. Dari kedua indikator yaitu kesehatan dan indikator pendidikan, jelas menunjukkan korelasi langsung dan merupakan mata rantai yang tidak terputuskan serta mempunyai pengaruh signifikan terhadap mutu Sumber Daya Manusia. Dengan demikian rendahnya tingkat kesehatan dan rendahnya mutu pendidikan masyarakat merupakan bukti belum berhasilnya pembangunan Pemerintah Indonesia bidang pendidikan.

Meskipun demikian Pemerintah secara terus menerus melakukan upaya, antara lain melalui penanganan penuntasan terhadap Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Kebijakan pembangunan bidang pendidikan dalam kurun waktu 2004 - 2009 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui Peningkatan Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini dirasakan kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar. Kebijakan ini dilakukan dikarenakan bersamaan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak beberapa tahun terakhir ini yang diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok lainnya yang berkorelasi negatif terhadap kemampuan daya beli masyarakat kurang mampu / miskin, sehingga kondisi semacam ini akan dapat menghambat upaya Penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, hal ini juga

diperparah dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Sehingga kedua permasalahan tersebut mempunyai dampak terhadap penduduk kurang mampu/miskin akan semakin sulit untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya biaya pendidikan.

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, Pemerintah telah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan merealokasi sebagian besar dananya ke empat program besar yang dirancang untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin, akibat peningkatan harga BBM. Keempat program tersebut adalah untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur perdesaan, dan bantuan langsung tunai. Salah satu program di bidang pendidikan yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana ke sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP yang bersedia memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan peserta program. Sekolah yang dicakup dalam program ini adalah SD/MI/SDLB/salafiyah setingkat SD dan SMP/MTS/SMPLB/salafiyah setingkat SMP, baik negeri maupun swasta. Program ini mulai dilaksanakan pada Juli 2005 bersamaan dengan awal tahun ajaran 2005/2006. Secara konseptual Program BOS berbeda dengan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan sebelumnya. Sampai dengan tahun anggaran

2004/2005, PKPS-BBM bidang pendidikan untuk tingkat SD dan SMP diberikan dalam bentuk beasiswa bagi siswa miskin, yang dikenal dengan sebutan Bantuan Khusus Murid (BKM). Jumlah siswa miskin yang mendapat BKM ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan indeks kemiskinan. Pada tahun ajaran 2004/2005, BKM diberikan kepada sekitar 20% siswa SD dan 24% siswa SMP, dengan nilai beasiswa Rp.60.000 per semester per siswa tingkat SD dan Rp.120.000 per semester per siswa tingkat SMP. Setiap sekolah yang mendapat kuota tertentu, melakukan seleksi siswa yang berhak menerima. Selanjutnya dana BKM diberikan langsung kepada siswa terpilih melalui kantor pos yang ditunjuk. Program BOS mengadopsi pendekatan yang berbeda dengan BKM karena dana tidak diberikan kepada siswa miskin tetapi diberikan kepada sekolah dan dikelola oleh sekolah. Jumlah dana BOS yang diberikan ke sekolah dihitung berdasarkan jumlah murid di masing-masing sekolah. Tujuan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin / tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu. Adapun ketentuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah :

- a. SD/MI/SDLB/Salafiyah/Sekolah agama non islam setara SD sebesar Rp 254.000,- /persiswa/tahun atau rata rata tiap bulan Rp. 21.000,00.

- b. SMP/MTs/SMPLB/SMTP/Salafiyah/sekolah agama non islam setara SMP sebesar Rp. 354.000,-/persiswa/tahun atau rata rata tiap bulan Rp. 30.000,00.
- c. Waktu pelaksanaan BOS pada tahun 2007 diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari samapai Desember 2007 yaitu untuk smester 2 tahun pelajaran 2006/2007 dan smester 1 (satu) tahun pelajaran 2007/2008 ;

Program BOS dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, juga akan berdampak negatif terhadap akses masyarakat miskin untuk mendapat Pendidikan Dasar (Wajardikdas) Sembilan Tahun. Sementara itu, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5, ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu,” dan pasal 11, ayat (1) menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.” Dalam konteks ini, pada prinsipnya Program BOS dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat khususnya siswa dari keluarga miskin terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Sekolah yang menerima BOS diharuskan untuk mengikuti semua aturan

yang ditetapkan oleh pengelola program, baik mengenai cara pengelolaan, penggunaan, pertanggungjawaban dana BOS yang telah diterima.

Berkaitan dengan pelaksanaan program BOS, di Kota Semarang yang sudah dimulai tahun 2006 yang diterima satu semester (Juli-Desember) sedangkan untuk tahun 2007 memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp.28.457.976.000,00. Dana bantuan BOS diterima langsung oleh masing-masing lembaga pendidikan, Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Atas baik negeri/swasta melalui nomor rekening Kepala Sekolah.

Permasalahan Program BOS di Kota Semarang, secara konsep program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau tidak mampu agar mereka dapat memperoleh layanan pendidikan Wajib Belajar yang memadai dan bermutu, akan tetapi *kenyataan praktek dilapangan pelaksanaan program BOS belum dapat berjalan seperti yang kita harapkan, hal dapat kita buktikan masih terdapat siswa tidak mampu yang belum memperoleh layanan pendidikan secara memadai seperti mereka tetap saja dalam memperoleh layanan pendidikan selalu dibebani biaya pendidikan, contoh sejak pendaftaran murid /siswa baru di tingkat SMP. Negeri sudah dikenakan untuk pembeliar formulir pendaftaran Rp. 5.000 s/d Rp. 10.000,- (besarnya pungutan ini*

bervariasi), biaya sumbangan uang gedung berkisar Rp. 1.500.000 s/d Rp. 3.500.000, membayar Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP), belum lagi berbagai jenis iuran yang dikenakan siswa oleh sekolah dengan berbagai keperluan kegiatan belajar mengajar, seperti iuran OSIS, tiap peringatan hari besar yang dilakukan oleh sekolah, dan tentunya masih banyak pungutan yang harus ditanggung siswa yang dilakukan oleh sekolah dengan berbagai alasan. Padahal keberadaan program BOS seharusnya dapat membantu bagi masyarakat tidak mampu yang seharusnya untuk mendapatkan bantuan (Majalah Diknas Jateng, 2007)

Faktor adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama ini belum pernah diterima dan dilakukan oleh sekolah, hal ini diibaratkan sekolah ibarat menerima “durian runtuh” meskipun telah dilakukan sosialisasi tetap saja sekolah mengalami kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan penggunaan dana BOS dirasakan belum efektif, seperti ditunjukkan besaran dana BOS dipakai untuk membayar guru tidak tetap pada hal pembayaran guru bantu menggunakan anggaran Pemerintah Daerah atau alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Wawasan, 20 Juni 2007)

Kelemahan lain pelaksanaan program BOS adalah secara konseptual BOS diberikan kepada siswa/siswi tidak mampu atau masyarakat miskin, tetapi kenyataan dilapangan belum sepenuhnya

siswa/siswi miskin/tidak mampu mendapatkan layanan pendidikan secara memadai. Sehingga hal ini sangat bertentangan dengan konsep program bantuan BOS sehingga perlu diluruskan. Permasalahan lain adalah penggunaan dana BOS oleh sekolah yang selama ini tidak pernah melakukan musyawarah dengan orang tua/wali termasuk dalam hal ini penyusunan RAPBS, sebaliknya orang tua murid /wali diundang oleh sekolah untuk berpartisipasi memberikan bantuan keuarangan anggaran sekolah yang sudah di tetapkan oleh sekolah. Dalam praktek pihak Kepala Sekolah yang dominan untuk melakukan pengelolaan BOS, belum lagi masih rendahnya tingkat akuntabilitas, penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh sekolah tidak di publikasikan atau belum pernah dilakukan audit oleh Akuntan publik, sehingga akuntabilitas dan kridibilitas masih diragukan (Wawasan, 15 Desember 2007)

Permasalahan yang selalu dialami oleh masyarakat, meskipun dana BOS telah dikucurkan Pemerintah kepada Sekolah Dasar /sederajad maupun Sekolah Menengah Atas/setingkat tetap saja setiap tahun ajaran baru /penerimaan murid baru selalu memungut bantuan dana rutin berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan maupun iuran Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP.3) atau dalam bentuk lain dengan berbagai dalih.

Bahkan sampai saat ini masih ada laporan bahwa terdapat beberapa warga yang berasal dari keluarga miskin menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah favorit dengan standar nasional karena benar-benar mempunyai prestasi siswa yang bagus, namun tetap dipungut biaya tambahan. Adanya penggunaan BOS yang tidak sesuai aturan, penggunaan dana BOS cenderung digunakan untuk melakukan perbaikan fasilitas gedung dan sarana komputer sehingga kurang efektif dalam menunjang kegiatan belajar anak sebagai penerima dana BOS (Wawasan, 26 Oktober 2007),

Ketertarikan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan BOS adalah dana BOS tersebut tidak diberikan langsung kepada siswa akan tetapi diterima dan dikelola oleh sekolah dan program BOS belum pernah dievaluasi, baik oleh lembaga sekolah maupun lembaga lain sehingga sampai saat ini belum mengetahui seberapa manfaat dan cakupan, pemertaan BOS bagi siswa/siswi miskin atau kurang mampu. Oleh karena itu untuk mengetahui tingkat efektivitas capaian sasaran program BOS di Kota Semarang sekiranya perlu dilakukan kajian melalui evaluasi program, dari sinilah maka penelitian ini akan mengangkat judul :

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA SEMARANG.

B. Identifikasi Dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah :

Permasalahan pelaksanaan program BOS bagi Wajar Dikdas 9 Tahun sangat kompleks, baik pada skala nasional maupun regional. Walaupun berbagai instrumen telah diterbitkan, tetapi kondisi secara umum menunjukkan bahwa pelaksanaan program BOS belum mampu memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat miskin secara berkualitas. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor dan masalah sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan dana operasional BOS di SMP Negeri Kota Semarang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan misalnya untuk pembelian komputer.
- b. Pelaksanaan program BOS di SMP Negeri Kota Semarang ternyata kurang atau belum efektif.
- c. Meskipun tujuan BOS untuk membebaskan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu/miskin kenyataan anak tidak mampu/miskin tetap saja dibebani biaya sekolah dengan berbagai dalih yang dibuat oleh sekolah.
- d. Meskipun dana BOS untuk salah satu untuk membiayai penerimaan murid baru, ternyata calon siswa tetap saja dikenakan biaya pendaftaran termasuk pembelian formulir.

- e. Meskipun terdapat dana BOS tetap saja oleh sekolah orang tua/wali murid diharuskan membayar sumbangan pendidikan (BP.3) maupun SPP yang rutin tiap bulan termasuk kegiatan-kegiatan belajar siswa.
- f. Penggunaan dana BOS tidak melibatkan atau musyawarah dengan orang tua/wali murid
- g. Akuntabilitas atau Pertanggung jawaban penggunaan dana BOS tidak atau belum di publikasikan.

Berkenaan permasalahan di atas maka dalam fokus penelitian yang akan diangkat adalah sejauhmana Cakupan dana BOS dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi siswa/siswi keluarga miskin atau tidak mampu serta seberapa besar dampak dana BOS bagi masyarakat maupun SMP Negeri selaku penerima BOS.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian mengenai latar belakang masalah, maka penelitian ini dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar cakupan dana BOS dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi siswa/siswi keluarga miskin dan tidak mampu bagi SMP Negeri ;

2. Bagaimanakah dampak pelaksanaan program BOS terhadap sekolah maupun masyarakat di Kota Semarang.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum penelitian pelaksanaan program BOS untuk SMP Negeri Kota Semarang adalah untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program BOS, sedangkan tujuan khusus adalah untuk :

1. Mengetahui seberapa besar cakupan dana BOS dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi siswa/siswi keluarga miskin atau tidak mampu;
2. Mengetahui seberapa besar dampak pelaksanaan program BOS terhadap sekolah maupun masyarakat di Kota Semarang.
3. Seberapa besar BOS untuk dapat memperluas Akses pendidikan bagi masyarakat miskin / tidak mampu SMP Negeri ?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan praktis dan kegunaan teori yang diuraikan di bawah ini :

1. Kegunaan Praktis :

Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Semarang maupun pihak-pihak terkait dalam melakukan perbaikan pelaksanaan program BOS tahun berikutnya.

2. Kegunaan teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam merumuskan Kebijakan Publik pada organisasi publik;

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Evaluasi Program dan Program

1. Pengertian Evaluasi Program

Evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris “*evaluation*” yang diserap dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi” yang dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertentu sehingga bersifat kuantitatif. Pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English* evaluasi adalah *to find out, decide the amount or value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kata-kata yang terkandung dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggungjawabkan (Suharsimi, 2007:1).

Suchman (dalam Anderson 1975) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari

beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Definisi lain dari Worthen dan Sanders (dalam Anderson, 1971) evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu, dalam mencari sesuatu tersebut juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur serta alternative strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Sedangkan Stufflebeam (dalam Fernandes,1984) mendefinisikan evaluasi sebagai proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternative keputusan.

Anderson (dalam Arikunto, 2004 : 1) memandang Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan Stufflebeam (dalam Arikunto, 2004 : 1), mengungkapkan bahwa Evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan ;

Sedangkan Pedoman Evaluasi yang diterbitkan Direktorat Ditjen PLS Depdiknas (2002 : 2) memberikan pengertian Evaluasi program adalah proses pengumpulan dan penelaahan data secara

berencana, sistematis dan dengan menggunakan metode dan alat tertentu untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan program dengan menggunakan tolok ukur yang telah ditentukan.

Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standard tertentu yang telah dibakukan.

Ralp Tyler,1950 (dalam Suharsimi, 2007) mendefinisikan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. Sedangkan Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.

Suharsmi Arikunto dan Abdul Jabar (2004 : 14) Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standard tertentu yang telah dibakukan.

Dari berbagai definisi tersebut di atas, dapat diintisarikan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu program pemerintah, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

2. Pengertian Program

Program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Apabila "program" ini dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dengan demikian yang perlu ditekankan bahwa program terdapat 3 unsur penting yaitu :

- a. Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.

- b. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan.**
- c. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.**

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Pengertian program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Pelaksanaan program selalu terjadi dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang.

3. Pengertian Siswa Miskin dan Siswa Tidak mampu ;

Berdasarkan data Balai Pusat Statistik pengertian siswa miskin adalah siswa yang berasal dari keluarga miskin dengan kriteria orang tua atau kepala keluarga tidak mempunyai pekerjaan yang menetap, tidak berpenghasilan tetap dan penghasilan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makan-minum 3 kali sehari dengan jumlah keluarga 4 orang , tempat tinggal dari dinding

kayu/tembok yang tidak sempurna, lantai masih berupa tanah/plesteran, telah mendapatkan kartu raskin. Sedangkan untuk keluarga tidak mampu, mereka telah bekerja tetapi penghasilan kurang /tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan tidak mendapatkan kartu raskin yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik setempat dan membawa surat keterangan tidak mampu dari Lurah .

B. Dimensi dan tahapan Evaluasi Program

Setelah kita menentukan obyek evaluasi selanjutnya harus menentukan aspek-aspek dari obyek yang akan evaluasi. Menurut Stake, 1967, Stufflebeam, 1959, Alkin 1969 (dalam Suharsimi, 2007) telah mengemukakan bahwa evaluasi berfokus pada empat aspek yaitu :

- a. Konteks
- b. Input
- c. Proses implementasi
- d. Produk

Bridgman dan Davis (dalam Farida Yusuf, 2000) yaitu evaluasi program yang secara umum mengacu pada 4 (empat) dimensi yaitu :

- a. Indikator *input*,

- b. Indikator *process*,
- c. Indikator *outputs*
- d. Indikator *outcomes*.

Menurut Beni Setiawan (1999:20) Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Bapenas, tujuan evaluasi program adalah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.

Menurut Beni Setiawan, (1999:20) dimensi utama evaluasi diarahkan kepada hasil, manfaat, dan dampak dari program. Pada prinsipnya yang perlu dibuat perangkat evaluasi yang dapat diukur melalui empat dimensi yaitu :

- a. indikator masukan (*input*),
- b. Proses (*process*)
- c. keluaran (*output*),
- d. indikator dampak atau (*outcome*)

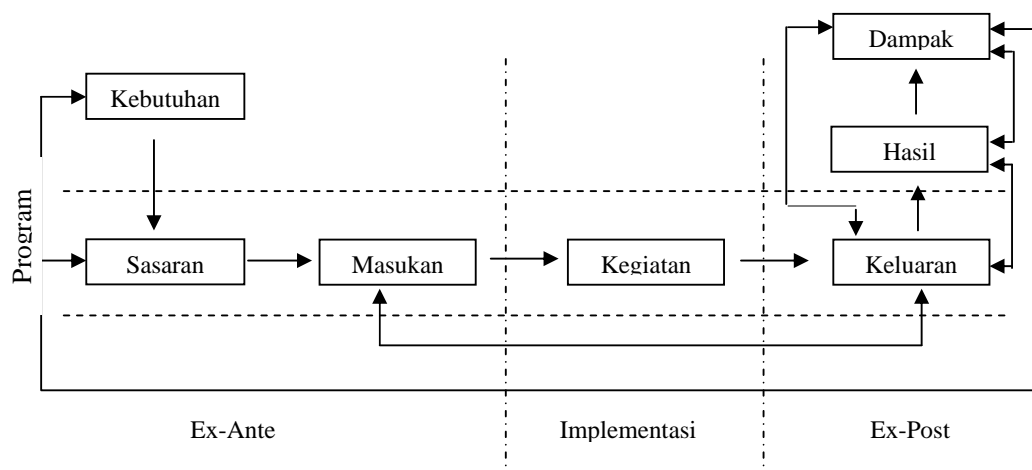
Evaluasi merupakan cara untuk membuktikan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dari suatu program, oleh karena itu pengertian evaluasi sering digunakan untuk menunjukkan tahapan siklus pengelolaan program yang mencakup :

- a. Evaluasi pada tahap perencanaan (*EX-ANTE*). Pada tahap perencanaan, evaluasi sering digunakan untuk memilih dan menentukan prioritas dari berbagai alternative dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan (*ON-GOING*). Pada tahap pelaksanaan, evaluasi digunakan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan program dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. Evaluasi pada tahap Pasca Pelaksanaan (*EX-POST*) pada tahap pasca pelaksanaan evaluasi ini diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini dilakukan setelah program berakhir untuk menilai relevansi (dampak dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dibandingkan keluaran), kemanfaatan (dampak dibandingkan hasil), dan keberlanjutan (dampak dibandingkan dengan hasil dan keluaran) dari suatu program.

Hubungan ketiga tahapan tersebut sangat erat, selanjutnya terdapat perbedaan metodologi antara evaluasi program yang berfokus kerangka anggaran dengan yang berfokus pada kerangka regulasi. Evaluasi program yang berfokus pada anggaran dilakukan dengan dua cara yaitu : Penilaian indikator kinerja program berdasarkan keluaran

dan hasil dan studi evaluasi program berdasarkan dampak yang timbul. Cara pertama dilakukan melalui perbandingan indikator kinerja sasaran yang direncanakan dengan realisasi, informasi yang relevan dan cukup harus tersedia dengan mudah sebelum suatu indikator kinerja program dianggap layak. Cara yang kedua dilaksanakan melalui pengumpulan data dan informasi yang bersifat lebih mendalam (*in-depth evaluation*) terhadap hasil, manfaat dan dampak dari program yang telah selesai dilaksanakan. Hal yang paling penting adalah mengenai informasi yang dihasilkan dan bagaimana memperoleh informasi, dianalisis dan dilaporkan. Informasi harus bersifat independen, obyektif, relevan dan dapat diandalkan. Untuk lebih jelas tahapan evaluasi sebagaimana gambar berikut :

Kriteria Evaluasi Program



C. Tujuan Evaluasi Program

Seperti disebutkan oleh Sudjana (2006 : 48), tujuan khusus Evaluasi Program terdapat 6 (enam) hal, yaitu untuk :

- 1) Memberikan masukan bagi perencanaan program;
- 2) Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program;
- 3) Memberikan masukan bagi pengambilan keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program
- 4) Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program;
- 5) Memberi masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervisi dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola dan pelaksana program dan.
- 6) Menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi program pendidikan luar sekolah.

Tujuan evaluasi program menurut Beni Setiawan, (1999:20) adalah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.

Sudjana, tujuan evaluasi adalah untuk melayani pembuat kebijakan dengan menyajikan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan secara bijaksana. Oleh karenanya evaluasi program dapat menyajikan 5 (lima) jenis informasi dasar sebagai berikut :

- 1) Berbagai data yang dibutuhkan untuk menentukan apakah pelaksanaan suatu program harus dilanjutkan.
- 2) Indikator-indikator tentang program-program yang paling berhasil berdasarkan jumlah biaya yang digunakan.
- 3) Informasi tentang unsur-unsur setiap program dan gabungan antar unsur program yang paling efektif berdasarkan pembiayaan yang diberikan sehingga efisiensi pelaksanaan program dapat tercapai.
- 4) Informasi untuk berbagai karakteristik sasaran program-program pendidikan sehingga para pembuat keputusan dapat menentukan tentang individu, kelompok, lembaga atau komunitas mana yang paling menerima pengaruh dari pelayanan setiap program.
- 5) Informasi tentang metode-metode baru untuk memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi pengaruh program.

D. Model Evaluasi Program

Model evaluasi adalah model desai evaluasi yang dibuat oleh para ahli/pakar evaluasi yang biasanya dinamakan sama dengan pembuatnya. Model ini dianggap model standar. Disamping itu ahli evaluasi yang membagi evaluasi sesuai dengan misi yang akan dibawakannya serta kepentingan atau penekannya atau dapat juga disebut sesuai dengan paham yang dianut yang disebut pendekatan atau *approach*. Ada banyak model evaluasi antara lain :

1. Model Evaluasi CIIP

Model ini menurut Stufflebeam ,1983 (dalam Farida Yusuf, 2000) pendekatan yang berorientasi pada pemegang keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*) untuk menolong administrator dalam membuat keputusan. Ia merumuskan evaluasi sebagai suatu proses menggambarkan, memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Dia membuat pedoman kerja untuk melayani para manajer dan administrator menghadapi empat macam keputusan pendidikan, membagi evaluasi menjadi empat macam, yaitu :

a. *Contact evaluation to serve planning descion*, konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan

kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program.

- b. Input evaluation, structuring decion*, evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.
- c. Process evaluation, to serve implementing decion*, evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan sampai sejauhmana rencana telah dapat diterapkan ? apa yang harus direvisi ? Begitu pertanyaan tersebut terjawab prosedur dapat dimonitor, dikontrol dan diperbaiki.
- d. Product evaluation, to serve recycling dicion*, evaluasi produk untuk menolong keputusan selanjutnya, apa hasil yang telah dicapai ? apa yang dilakukan setelah program berjalan.

Keempat hal tersebut di atas merupakan sasaran evaluasi yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Model evaluasi CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Dengan demikian apabila evaluator sudah menentukan model CIPP akan digunakan untuk mengevaluasi program yang ditugaskan maka mau tidak mau mereka harus menganalisis

program tersebut berdasarkan komponennya. Model ini sekarang telah disempurnakan dengan satu komponen O singkatan dari *outcomes*, sehingga menjadi model CIPPO.

2. Model Evaluasi UCLA

Alkin, 1969 (dalam Farida Yusuf, 2000) menulis kerangka evaluasi yang hampir sama dengan model CIPP. Alkin mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih alternatif, mengemukakan lima macam evaluasi, yakni :

- a. *Sistem assessment*, yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem,
- b. *Program planning*, membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program,
- c. *Program implementation*, yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang direncanakan,
- d. *Program improvement*, yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, atau berjalan ? apakah menuju pencapaian tujuan, adakah hal-hal atau masalah-masalah baru yang muncul tak terduga,

e. *Program certification*, yang memberi informasi tentang nilai atau guna program.

Sudjana, (2006:51) berpendapat bahwa model evaluasi terdapat enam model, yaitu :

- (a) Model evaluasi terfokus pada pengambilan keputusan (jenis inilah yang terbanyak digunakan),
- (b) Model evaluasi terhadap unsur-unsur program,
- (c) Model evaluasi terhadap jenis/tipe kegiatan program,
- (d) Model evaluasi terhadap proses pelaksanaan program,
- (e) Model evaluasi terhadap pencapaian tujuan program,
- (f) Model evaluasi terhadap hasil dan pengaruh program.

Kegunaan utama model ini untuk mengkaji sejauhmana suatu Lembaga Penyelenggara dan Pengelola Pelayanan program Pendidikan kepada masyarakat telah berhasil dalam melaksanakan misinya. Dalam konteks ini maka evaluasi pengaruh diawali dengan mempelajari misi yang terdapat dalam program dan mengidentifikasi hasil-hasil utama program yang ingin dicapai dan/atau hasil-hasil program yang tidak tercapai, model ini pada awalnya dikembangkan untuk mengevaluasi proyek-proyek pengembangan Sumber Daya Manusia yang terdiri atas :

- a. Pemantauan proyek untuk mengetahui efisiensi proyek-proyek tertentu,
- b. Evaluasi tentang keberhasilan atau kegagalan sementara suatu program.
- c. Evaluasi yang mengkaji tujuan-tujuan jangka panjang suatu program dengan melihat keberhasilan dan kegagalan program dalam jangka panjang tersebut.

Sudjana (dalam Rafida,2000) memaknai bahwa tujuan evaluasi adalah untuk melayani pembuat kebijakan dengan menyajikan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan secara bijaksana. Oleh karenanya evaluasi program dapat menyajikan 5 (lima) jenis informasi sebagai berikut :

- a) Berbagai data yang dibutuhkan untuk menentukan apakah pelaksanaan suatu program harus dilanjutkan.
- b) Indikator-indikator tentang program-program yang paling berhasil berdasarkan jumlah biaya yang digunakan.
- c) Informasi tentang unsur-unsur setiap program dan gabungan antar unsur program yang paling efektif berdasarkan pembiayaan yang diberikan sehingga efisiensi pelaksanaan program dapat tercapai.
- d) Informasi untuk berbagai karakteristik sasaran program-program pendidikan sehingga para pembuat keputusan dapat menentukan

- tentang individu, kelompok, lembaga atau komunitas mana yang paling menerima pengaruh dari pelayanan setiap program.
- e) Informasi tentang metode-metode baru untuk memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi pengaruh program.

Ernest R House (dalam Riant, 2006 : 165) membagi Model evaluasi menjadi :

- a) Model sistem (dengan indikator utama adalah efisiensi)
- b) Model Perilaku (dengan indikator utama adalah produktivitas dan akuntabilitas)
- c) Model Formulasi Keputusan (dengan indikator utama adalah keefektifan dan keterjagaan kualitas)
- d) Model Tujuan-bebas (*goal free*) dengan indikator utama adalah pilihan pengguna dan manfaat sosial.
- e) Model Kekritisian Seni (*art criticism*), dengan indikator utama adalah standar yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat.
- f) Model Review Profesional, dengan indikator utama adalah penerimaan profesional.
- g) Model Kuasi-Legal (*quasi-legal*), dengan indikator utama adalah resolusi.

h) Model Studi Kasus, dengan indikator utama adalah pemahaman atas diversitas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini akan menggunakan metode atau pendekatan deskriptif kualitatif, karena tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menggambarkan apa adanya mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena sosial tertentu. Dalam hal ini guna menganalisis data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh, dengan harapan dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan Program BOS, faktor pendukung dan faktor penghambat serta dampaknya terhadap angka partisipasi yang telah memperoleh layanan BOS di Kota Semarang.

Data kuantitatif yang berbentuk tabel-tabel dan berupa angka-angka yang dikumpulkan akan ditampilkan dilakukan analisis dan pembahasan secara detail, digunakan untuk mendukung analisis secara keseluruhan sebagai pembuktian bagi fenomena-fenomena yang sedang diteliti, yang dalam hal ini tentang pelaksanaan Program bantuan dana BOS dengan sasaran utama adalah Lembaga-lembaga pendidikan dasar (SD dan SMP) di Kota Semarang selaku penerima bantuan dana, baik sebelum kegiatan selama melakukan kegiatan operasional dan sudah mendapatkan bantuan dana bantuan BOS.

Sebagaimana dikemukakan Lexy J. Moleong (2001:122) peneliti langsung masuk ke lapangan dan berusaha mengumpulkan data secara lengkap sesuai dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kebijakan Program pemberian bantuan dana BOS. Data yang dihimpun sesuai fokus penelitian berupa kata-kata, tindakan, situasi, dokumentasi dan peristiwa yang diobservasi. Pengumpulan data/informasi ini peneliti sekaligus sebagai instrumen yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*Indepth interview*), oleh karenanya Peneliti akan mencatat, serta menggunakan dukungan alat perekam atau tape recorder, dan mengamati perilaku orang yang diwawancarai.

B. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian dimaksudkan guna memperjelas ruang lingkup pembahasan penelitian ini, sehingga terhindar dan tidak terjebak oleh pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun Pembatasan dan ruang lingkup penelitian ini meliputi :

1. Definisi Konsep

Evaluasi adalah kegiatan penilaian dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan efisiensi terhadap pelaksanaan suatu program.

2. Definisi Operasional

Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pendidikan dasar menengah di Kota Semarang yang diukur dengan indikator :

a. Masukan (input) program BOS

1). Jumlah anggaran BOS (kesesuaian jumlah)

2). Instrumental

a) Tim BOS

b) Juklak/Juknis

c) Jumlah SDM pelaksana (pendidikan, ketrampilan, pelatihan)

d) Pengelola / penyelenggara (pendidikan, pelatihan, kemampuan)

e) Sarana (peralatan tulis, administrasi)

f) Prasarana (tempat kegiatan, ruang halaman)

g) Biaya Administrasi pelaksana

b. Proses Pendistribusian (*process*) BOS

1). Tujuan BOS

2). Sasaran BOS

3). Media

4). Alokasi Waktu

c. Dampak (*outcome*) Program BOS

1. Organisasi/Lembaga yang berkaitan dengan aspek manfaat peningkatan fasilitas sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan program pembelajaran maupun aspek-aspek lainnya setelah Lembaga menerima BOS.
2. Peningkatan dana
3. Peningkatan akses dan perluasan layanan
4. Partisipasi orang tua anak didik dan masyarakat terhadap program BOS
5. Tingkat intensitas kegiatan anak didik dalam proses belajar.
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas Saprass Sekolah.
7. Menurunnya angka droup out anak usia sekolah
8. Peningkatan layanan bagi masyarakat miskin

3. Faktor Pendukung dan penghambat pelaksanaan program BOS di Kota Semarang
 - a. Faktor Pendukung
 - b. Faktor Penghambat

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP.N) di Kota Semarang dengan pertimbangan

untuk mempermudah jangkauan informasi dan pengumpulan data, ketersediaan tenaga serta efisiensi biaya, SMP. Negeri dukungan anggaran lebih dominan diperoleh dari pemerintah, pertimbangan yang lain peneliti bertempat tinggal di Semarang sehingga penelitian diharapkan akan dapat selesai tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.

D. Instrumen Penelitian

Penelitian ini rencananya akan menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif yang diperkaya dengan kuantitatif, oleh karena itu dalam penelitian ini sebagai instrumen penelitian adalah kuessioner yang akan didistribusikan keseluruh SMP. Negeri di Semarang, untuk mempertajam hasil penelitian Peneliti sendiri juga menjadi instrumen yang langsung menggali data / informasi, baik data primer maupun skunder yang mendasarkan pada aspek-aspek penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan Program bantuan dana BOS di Kota Semarang, sebagai pendukung dalam peneliti melakukan penelitian dibantu dengan data-data (dokumentasi), sedangkan untuk menggali informasi peneliti langsung mengadakan tanya jawab dibantu daftar pertanyaan untuk memudahkan dalam penggalian data dan informasi yang diperlukan.

E. Pemilihan Informan

Di dalam melakukan pemilihan *key informan* untuk mendukung hasil penelitian, maka pemilihan key informan dipikirkan orang yang benar-benar mengetahui dan menguasai serta teribat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Key informan yang bersinggungan langsung dengan pelaksanaan program bantuan dana BOS di Kota Semarang antara lain : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang, Kepala Subdin yang menangani langsung pendistribusian dana bantuan BOS, Kepala Sekolah SMP dan Komite Sekolah .

F. Sumber Data

Adapun data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, agar diperoleh hasil penelitian yang valid akurat dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data penelitian akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1. Data Primer yaitu data yang diambil langsung dari responden.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, berupa laporan administrasi atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan dana Bantuan Operasional Sekolah.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian akan menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Observasi atau pengamatan

Pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan melalui kegiatan observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek analisis untuk menggali aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis dan interpretasi yang akan dilakukan. Pengamatan di lapangan ini bertujuan untuk menggali kemungkinan adanya informasi yang terlewatkan dari pedoman wawancara yang dilakukan dan berupaya memperkaya dimensi pengamatan dari fenomena analisis yang ada. Selain melakukan pengamatan juga diadakan pengumpulan data dan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang keberhasilan implementasi kebijakan Program BOS. disamping dilakukan pengamatan, informasi maupun data yang mendalam tentang faktor-faktor pendukung, faktor penghambat, dampaknya bagi Pelaksanaan Program BOS di lembaga Pendidikan Dasar.

2. Wawancara

Penelitian ini agar dapat memperoleh data yang valid atau akurat disamping observasi, pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dimaksudkan untuk

memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap nara sumber (key informan) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sedang diamati yaitu SMP. Negeri di Kota Semarang.

Dalam kegiatan wawancara mendalam (*in depth interview*) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap nara sumber (*key informan*) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena terhadap obyek yang sedang diamati yaitu pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah di Kota Semarang. Adapun pihak-pihak yang akan menjadi target wawancara meliputi :

- a. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- b. Kepala Subdin Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (dalam hal ini Kepala Subdin yang menangani Program BOS.
- c. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang (Kepala Subdin yang menagnai Program BOS.
- d. Tim Pelaksana Program bantuan dana BOS Kota Semarang.
- e. Tenaga Pendidik atau Guru SMP Negeri di Kota Semarang.

- f. Peserta didik SMP negeri selaku penerima bantuan BOS di Kota Semarang
- g. Pihak-pihak lain yang dinilai relevan dan dibutuhkan atau ditemukan saat penelitian dilakukan.

3. Dokumentasi

Penggunaan dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen resmi dari Lembaga/Organisasi yang telah melaksanakan Program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selaku pihak yang telah penerima dana bantuan BOS sebagai bukti-bukti fisik dari kegiatan yang telah diselenggarakan. Dokumen dimaksud mencakup surat-surat, data-data/informasi, catatan, foto-foto kegiatan, rekaman tape recorder dan lainnya yang relevan serta berkas laporan-laporan yang telah disusun berbagai pihak tentang obyek yang diteliti.

H. Populasi dan Sampel

Suharsimi Arikunto (1998 : 115) mengemukakan bahwa “ Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian” Pengertian tentang populasi merupakan keseluruhan obyek atau sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian, dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi masalah penelitian. Populasi dalam

penelitian ini adalah semua SMP Negeri atau sejumlah 41 SMP Negeri yang ada di Kota Semarang.

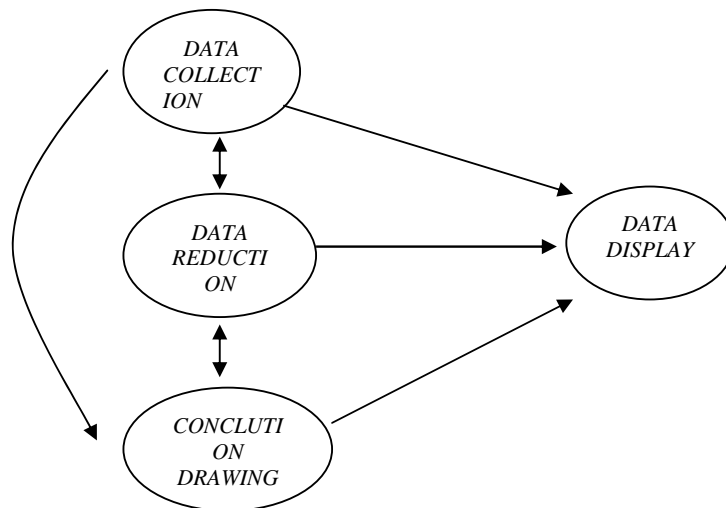
Metode Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel penelitian dilakukan dengan menetapkan wilayah-wilayah populasi sebagai anggota populasi untuk membentuk populasi kecil yang lebih homogen. Adapun jumlah sampel adalah 10 SMP. Negeri.

I. Analisis Data

Analisis Data atau Pengolah Data adalah bentuk analisis yang lebih rinci dan mendalam juga membahas suatu tema atau pokok permasalahan. Dimana dalam analisis ini, fokus penelitian maupun pembahasan kendati diarahkan pada bidang atau aspek tertentu, namun pendiskrepsian fenomena yang menjadi tema sentral dari permasalahan penelitian diungkapkan secara rinci (Zaenal Hidayat : 2002 :8).

Analisa tabel tunggal dipergunakan untuk data yang diperoleh dengan metode survai, sedangkan untuk data kualitatif yang diperoleh dengan wawancara mendalam, FGD dan observasi dilakukan analisa dengan metode analisis *operational component* berikut. Dalam pelaksanaan analisis data kualitatif bertujuan pada penggalian makna, penggambaran, penjelasan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing. Uraian data jenis ini berupa kalimat-kalimat, bukan

angka-angka atau tabel-tabel. Untuk itu data yang diperoleh harus diorganisir dalam struktur yang mudah dipahami dan diuraikan. Sanafiah Faisal (1999:256) menggambarkan proses analisis kualitatif sebagai berikut :



Gb. III. 1. *Operational Component*, (Sanafiah faisal, 1999:256)

Dari gambar tersebut di atas, dapat dijelaskan, bahwa proses pengumpulan data kualitatif yang dilakukan perlu *di-display*. *Display* akan sangat membantu baik peneliti itu sendiri maupun bagi orang lain, *display* merupakan media penjas obyek yang diteliti. Selain itu proses reduksi data ditujukan untuk menyaring , memilih dan memilah data yang diperlukan, menyusunnya ke dalam suatu urutan rasional dan logis, serta mengaitkannya dengan aspek-aspek terkait. Hasilnya adalah berupa kesimpulan tentang obyek yang diteliti (Suharsimi, 2007:126)

BAB IV
DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN
DAN GAMBARAN UMUM PROGRAM BOS

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Letak Geografis Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang awalnya dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950, yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dengan sebutan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. Sesuai dengan dinamika dan perkembangan Sistem Pemerintahan di Indoonesia, pada tahun 1997 telah terjadi reformasi Sistem Pemerintahan Indonesia dengan penyempurnaan Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan selanjutnya dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka nomenklatur sebutan pemerintahan berubah menjadi Pemerintah Kota Semarang. Dalam tata kelola pemerintahannya, dipimpin oleh seorang Walikota yang dibantu oleh seorang Wakil Walikota dan berkedudukan di pusat perkotaan .

Letak geografis Kota Semarang sangat strategis, hal ini dikarenakan daerah ini memiliki 4 (empat) lintas kawasan antar

Provinsi yang terbentang. mulai dari wilayah Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa, dikenal sebagai jalur penting dan jalur utama lalu lintas antar Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Demikian juga dengan sebutan sebagai Kota Besar, maka Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki areal tanah seluas 37.366.838 hektare atau 373,7 km². Kondisi lahan tersebut, tersebar dalam 16 (enam belas) Kecamatan yang mencakup 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Kelurahan dengan penataan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Wilayah atau Bagian Utara, yaitu diposisikan dan dikenal sebagai daerah Pantai dan memiliki Pelabuhan dengan nama Tanjung Emas
- b. Wilayah atau Bagian Timur, yaitu berbatasan dengan Kabupaten Demak (akses jalur lalu lintas dengan tujuan Surabaya) dan Kabupaten Grobogan
- c. Wilayah atau Bagian Barat, yaitu berbatasan dengan Kabupaten Kendal (akses jalur lalu lintas dengan tujuan ke Jakarta).
- d. Wilayah atau Bagian Selatan, yaitu berbatasan dengan Kabupaten Semarang, yang sekaligus akses jalur lalu lintas dengan tujuan kota kota dinamis seperti Kota Magelang, Kota Surakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam proses perkembangannya kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu kota yang mempunyai ciri khas yaitu kota pegunungan dan kota pantai di daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90.359 meter di bawah permukaan laut, sedangkan di daerah dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 5,5 meter di bawah permukaan.

2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2006, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebesar 1.434.025 jiwa dengan pertumbuhan penduduk selama tahun 2005 sebesar 1.02%, kondisi tersebut memberi arti bahwa pembangunan kependudukan khususnya usaha untuk menurunkan jumlah kelahiran memberikan hasil yang nyata. Sekitar 73,99% penduduk Kota Semarang berumur produktif (15 – 64 th) sehingga angka beban tanggungan yaitu perbandingan antara penduduk usia produktif dengan penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65th ke atas) pada tahun 2006 sebesar 35,18 yang berarti 100 orang penduduk usia produktif menanggung 35 orang penduduk usia tidak produktif.

Dalam kurun waktu 5 tahun (2002-2006) kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Disisi lain penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum

merata, tercatat Kecamatan Semarang Tengah sebagai wilayah terpadat, sedangkan Kecamatan Mijen merupakan wilayah yang kepadatan penduduknya paling rendah. Sejalan dengan laju perkembangan dan pertumbuhan penduduk, untuk sector tenaga kerja ini diprioritaskan pada penciptaan perluasan dan pemerataan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja.

Angkatan kerja adalah penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, mereka yang dapat diserap oleh pasar kerja digolongkan bekerja, sedangkan yang tidak/belum diserap oleh pasar kerja yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan. Disisi lain mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi digolongkan sebagai bukan angkatan kerja yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga, sekolah atau mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan karena usia tua atau alasan fisik. Untuk tahun 2005 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yaitu perbandingan antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja sebesar 65,78% sedangkan tingkat kesempatan kerja yaitu perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan penduduk usia kerja pada tahun 2006 sebesar 42,35 % (BPS. Kota Semarang, 2006)

3. Pendidikan Kota Semarang

Brdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Semarang tahun 2006 bahwa Jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebesar 1.434.025 jiwa dengan tingkat pendidikan yang sangat ragam yakni dari jumlah tersebut sebanyak 139.278 orang berpendidikan Sekolah Dasar dan sebesar 64.304 orang berpendidikan etingkat Sekolah Menengah Pertama sedangkan sebesar 35.573 orang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau setingkat, sebesar 56.021 orang berpendidikan Akademi setingkat sarjana muda dan 58,138 orang berpendidikan tinggi atau Universitas. Untuk mengetahui secara detail gambaran penduduk Kota Semarang berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat tabel IV.1 tersebut di bawah ini :

Tabel IV.1
JUMLAH SISWA SD, SMP DAN SLTA
KOTA SEMARANG TAHUN 2007

NO	KECAMATAN	SD	SLTP	SLTA
1	Mijen	5.260	1.986	1.349
2	Gunungpati	5.116	2.662	1.356

3	Banyumanik	11.665	4.921	3.137
4	Gajahmungkur	5.489	2.340	1.916
5	Semarang Selatan	9.651	6.351	4.729
6	Candisari	7.360	3.724	1.290
7	Tembalang	10.109	2.932	844
8	Pedurungan	13.895	6.024	2.572
9	Genuk	7.920	2.113	1.169
10	Gayamsari	6.679	4.056	305
11	Semarang Timur	9.718	5.037	2.291
12	Semarang Utara	9.197	1.666	1.273
13	Semarang Tengah	9.446	8.786	6.853
14	Semarang Barat	14.771	7.936	4.238
15	Tugu	2.764	1.553	1.007
16	Ngaliyan	9.938	2.217	1.244
	Jumlah	139.278	64.304	35.573

Sumber : diolah dari data BPS, 2006 Kota Smg

Guna menunjang pembangunan Sumberdaya Manusia di Kota Semarang bidang pendidikan menjadi perhatian yang cukup besar untuk keperluan ini Pemerintah Kota Semarang bersama-sama dengan instansi terkait dan pihak swasta selalu memberikan dorongan dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Dorongan yang ada, bukan hanya memberikan bantuan dan penyuluhan tetapi juga menumbuh kembangkan semangat membangun sarana prasarana dan infrastruktur pendidikan. Seperti halnya pembangunan sarana pendidikan dari seluruh jenjang pendidikan, hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah mempunyai komitmen memperhatikan kebutuhan penduduknya dalam bidang layanan pendidikan.

Pembangunan pada sektor Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesias yang cerdas dan trampil yang diikuti oleh rasa percaya diri serta sikap inovatif, disamping itu merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung seumur hidup dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Perkembangan tingkat partisipasi sekolah haruslah diimbangi dengan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai, untuk jelasnya lihat data sekolah berikut :

Tabel IV.2
 JUMLAH SEKOLAH SD, SLTP, SLTA NEGERI DAN SWASTA
 KOTA SEMARANG TAHUN 2007

NO	KECAMATAN	SD	SLP	SLTA
1	Mijen	28	5	3
2	Gunungpati	35	9	6

3	Banyumanik	57	12	6
4	Gajahmungkur	28	6	7
5	Semarang Selatan	41	11	6
6	Candisari	45	8	3
7	Tembalang	42	6	1
8	Pedurungan	50	12	6
9	Genuk	33	8	4
10	Gayamsari	31	8	4
11	Semarang Timur	47	14	5
12	Semarang Utara	43	9	2
13	Semarang Tengah	46	22	13
14	Semarang Barat	67	21	9
15	Tugu	14	5	1
16	Ngaliyan	42	6	2
	Jumlah	649	162	78

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Smg, 2007

4. Dinas Pendidikan Kota Semarang

Dinas pendidikan Kota Semarang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 03) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota nomor : 061.1/173 tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi. Berdasarkan kebijakan tersebut di atas, Dinas Pendidikan sebagai lembaga perangkat daerah yang melaksanakan tugas layanan bidang pendidikan dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan yang meliputi TK, SD, SDLB, SLTP, SMU, SMK serta pemberdayaan pemuda, olahraga, kesiswaan, pendidikan luar sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pelaksanaan akreditasi terhadap Guru, Kepala Sekolah dan Sekolah;
- d. Pengelolaan standar pelayanan minimal Sekolah dan Kursus;
- e. Pembinaan terhadap Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas Pendidikan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1 Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi dan tata kerja Dinas pendidikan Kota Semarang sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Sub Bagian Kepegawaian
 - c) Sub Bagian Keuangan

d. Kepala Sub Dinas :

- a) Sub Dinas Perencanaan dan Program
- b) Sub Dinas TK dan Pendidikan Dasar
- c) Sub Dinas Pendidikan Menengah
- d) Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
- e) Sub Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
- f) Sub Dinas Tenaga Edukatif dan Non Edukatif
- g) Cabang Dinas.
- h) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- i) Kelompok Jabatan Fungsional

4.2 Visi dan Misi

Visi adalah merupakan sebuah keinginan yang akan dicapai dalam waktu tertentu, sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi. Atas dasar kewenangan tersebut maka Dinas Pendidikan Kota Semarang telah menetapkan Visi ” *Terwujudnya masyarakat Kota Semarang menjadi unggul berakhlak mulia, terampil dan ulet* ” dalam mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan pendidikan pada semua jenjang,
2. Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu dasar, bahasa asing dan media komunikasi,

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang produktif, mandiri, sehat jasmani rohani, mampu berdaya saing serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

B. Gambaran Umum Program Bos

Program BOS dilatarbelakangi adanya kebijakan Pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak dan telah merelokasikan sebagian besar anggaran yang dirancang untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak dari kenaikan bahan bakar minyak. Ada 4 (empat) sektor alokasi anggaran subsidi bahan baker minyak antara lain untuk :

- a. Bidang pendidikan**
- b. Bidang kesehatan**
- c. Bantuan infrastruktur pedesaan**
- d. Subsidi Langsung Tunai (SLT)**

Untuk bidang pendidikan konsep Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) untuk SD dan SMP yang semula program Bantuan Khusus Murid (BKM) yang langsung diberikan kepada siswa/murid miskin yang telah diseleksi oleh

sekolah sesuai alokasi anggaran yang diterima, program tersebut telah diubah menjadi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan. Besarnya dana untuk tiap tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid. Untuk menyamakan persepsi dan kesamaan pemahaman BOS secara singkat kita uraikan terlebih dahulu mengenai definisi Biaya Pendidikan dan terminologi program BOS. Biaya Satuan Pendidikan (BSP) adalah besarnya biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa tiap tahun, sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dari cara penggunaannya, BSP dibedakan menjadi BSP Investasi dan BSP Operasional. BSP Investasi adalah biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam satu tahun untuk pembiayaan sumberdaya yang tidak habis pakai dalam waktu lebih dari satu tahun, seperti pengadaan tanah, bangunan, buku, alat peraga, media, perabot dan alat kantor. Sedangkan BSP Operasional adalah biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam satu tahun untuk

pembiayaan sumber daya pendidikan yang habis pakai dalam satu tahun atau kurang. BSP Operasional mencakup biaya personil dan biaya non personil.

Biaya personil meliputi biaya untuk kesejahteraan (honor Kelebihan Jam Mengajar (KJM) , Guru tidak tetap (GTT), Pegawai tidak tetap (PTT), uang lembur) dan pengembangan profesi guru (Pendidikan dan Latihan Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), dan lain-lain. Biaya non personil adalah biaya untuk penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), evaluasi/penilaian, perawatan/pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervise. Selain dari biaya-biaya tersebut, masih terdapat jenis biaya operasional yang ditanggung oleh peserta didik, misalnya biaya transportasi, konsumsi, seragam, alat tulis, kesehatan, rekreasi dan sebagainya.

Berdasarkan hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencakup dua komponen yaitu biaya operasional dan biaya non personil, oleh karena biaya satuan yang digunakan adalah rata-rata nasional, maka penggunaan BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya

investasi. Namun perlu ditegaskan bahwa prioritas utama BOS adalah untuk biaya operasional non personil bagi sekolah. Oleh karena keterbatasan dana BOS dari pemerintah Pusat, maka biaya untuk investasi sekolah dan kesejahteraan guru harus dibiayai dari sumber lain, dengan prioritas utama dari sumber pemerintah, pemerintah daerah dan selanjutnya dari partisipasi masyarakat yang mampu.

1. Tujuan Program BOS

Berdasarkan Buku Panduan pelaksanaan program BOS, tujuan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu (miskin) dan meringankan bagis siswa yang lain agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun.

2. Sasaran Program BOS

Adapun sasaran Program BOS adalah semua lembaga Sekolah setingkat SD, SMP baik negeri maupun Swasta diseluruh Provinsi di Indonesia. Besar dana BOS yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. **SD/MI setingkat bantuan BOS sebesar Rp. 254.000,- siswa/pertahun atau berkisar Rp. 21.000,- siswa/bulan.**
- b. **SMP/MTs setingkat bantuan BOS sebesar Rp. 354.000,- siswa/pertahun atau berkisar Rp. 29.500,- siswa/bulan.**

3. Dasar Hukum Program BOS

Adapun dasar hukum pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sebagai berikut :

- a. Amanat Undang Undang Dasar 1945 (Pembukaan, alinea ke-4) :
Salah satu tujuan kemerdekaan adalah “ mencerdaskan kehidupan bangsa”.
- b. Pasal 28 B (ayat 2) Amandemen Undang Undang Dasar 1945 :
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
- c. Pasal 28 C (ayat 2) Amandemen Undang Undang Dasar 1945 :
“Setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan

budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

- d. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 1, Butir 14) : Pendidikan anak adalah “suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1998 ;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
- h. Instruksi Presiden Nomor 24 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara ;

- i. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun ;
- j. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan dasar ;
- k. Surat Edaran Dirjen Pajak Departemen Keuangan Nomor SE.02/PJ/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

4. Waktu Pelaksanaan BOS

Pada Tahun anggaran 2007 dana BOS akan diberikan selama 12 bulan yaitu pencairan dana dilakukan tiap triwulan dan pencairan dana BOS direalisasikan pada awal bulan tiap triwulan.

5. Sekolah Penerima BOS

Semua sekolah negeri dan swasta berhak memperoleh BOS khusus sekolah/madrasah/ponpes swasta harus memiliki ijin operasional (piagam penyelenggaraan pendidikan). Sekolah/madrasah/ponpes yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan yang tertuang

dalam buku petunjuk pelaksanaan ini. Sekolah kaya/mapan/yang mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki penerimaan lebih besar dari dana BOS, mempunyai hak untuk menolak BOS tersebut, sehingga tidak wajib untuk melaksanakan ketentuan seperti sekolah/madrasah/ponpes penerima BOS. Keputusan atas penolakan BOS harus melalui persetujuan dengan orang tua siswa dan komite sekolah/madrasah. Bila di sekolah/madrasah/ponpes yang mampu tersebut terdapat siswa miskin, sekolah/madrasah/ponpes tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa tersebut (misalnya melakukan subsidi silang dengan dana dari siswa yang mampu).

6. Program BOS dan Wajib belajar Dikdas

Dalam rangka penuntasan Wajib 9 tahun yang bermutu, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Salah satu program yang diharapkan berperan besar terhadap percepatan penuntasan Wajib 9 Tahun yang bermutu adalah program BOS. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Melalui program BOS yang terkait dengan gerakan percepatan penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun, maka setiap pelaksana program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut :

- a. BOS harus menjadi sarana penting untuk mempercepat penuntasan Wajib Dikdas 9 Tahun.
- b. Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/ponpes.
- c. Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/MI/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB dengan alasan mahal biaya masuk sekolah.
- d. Kepala sekolah/madrasah/ponpes mencari dan mengajak siswa SD/MI/SDLB yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/MTs/SMPLB. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.

7. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah

Dalam program BOS, dana diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah tanpa intervensi dari pihak lain. Dengan demikian program BOS sangat mendukung implementasi penerapan MBS, yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih

besar, untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Melalui program BOS, warga sekolah diharapkan dapat lebih mengembangkan sekolah dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen sekolah.
2. Bagi siswa tidak mampu harus dibebaskan dari segala pungutan/gratis. Namun demikian masyarakat dan orangtua siswa yang mampu diharapkan tetap berpartisipasi dalam pengembangan sekolah.
3. Sekolah dapat melaksanakan semua kegiatan secara lebih profesional, transparan, mandiri, kerjasama, dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. Organisasi Pelaksana Program BOS

Organisasi pelaksana program BOS dipisah antara Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Di tingkat pusat, Provinsi dan kabupaten/kota terdapat Tim Manajemen BOS untuk masing-masing departemen dan tingkat pemerintahan. Untuk organisasi pelaksana Kota Semarang sebagai berikut :

- a. Tim Pengarah

- Bupati/Walikota
- Ketua Bappeda Kabupaten/Kota

b. Tim Manajemen BOS

1. Tim Dinas Pendidikan Kota Penanggungjawab

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Tim Pelaksana
- Manajer
- Seksi Pendataan
- Seksi BOS dan BOS Buku SD
- Seksi BOS dan BOS Buku SMP
- Seksi Monev dan Penyelesaian Masalah
- Seksi Publikasi/Humas

2. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen BOS Kab/Kota

- Menetapkan alokasi dana untuk setiap sekolah/madrasah/ponpes
- Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah /madrasah/ponpes penerima BOS.
- Melakukan pendataan sekolah/madrasah/ponpes.
- Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dan lembaga penyalur dana, serta dengan sekolah /madrasah /ponpes dalam rangka penyaluran dana.
- Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.

- Melaporkan pelaksanaan program kepada Tim Manajemen BOS Provinsi.
- Mengumpulkan data dan laporan dari sekolah/madrasah ponpes dan lembaga penyalur.
- Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- Bertanggung jawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat kabupaten/kota.
- Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim Manajemen BOS Provinsi dan instansi terkait.

9. Mekanisme dan Pelaksanaan BOS

9.1 Mekanisme Alokasi Dana BOS

Pengalokasian dana BOS dilaksanakan sebagai berikut

:

- a. Tim Manajemen BOS pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui tim manajemen BOS provinsi, selanjutnya menetapkan alokasi dana BOS tiap provinsi.**

- b. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah tim BOS pusat membuat alokasi dana BOS tiap-tiap provinsi yang telah dituangkan dalam DIPA Provinsi.**
- c. Tim manajemen BOS Provinsi dan tim manajemen BOS Kab/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah.**
- d. Tim manajemen BOS Kab/Kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui surat keputusan penetapan sekolah umum yang menerima BOS yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan Dewan Pendidikan.**
- e. Tim manajemen BOS kota/kabupaten mengirim surat keputusan alokasi BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke-tim manajemen BOS provinsi dengan tembusan lembaga Bank atau Kantor Pos penyalur dana dan sekolah penerima BOS.**

9.2 Mekanisme Penyaluran Dana BOS

Adapun persyaratan penyaluran dana BOS adalah :

- a. Bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin harus membuka nomor rekening atas nama lembaga (tidak boleh atas nama pribadi).
- b. Sekolah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada tim manajemen BOS kabupaten\kota
- c. Tim manajemen BOS kabupaten\kota melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening sekolah selanjutnya dikirim kepada tim manajemen BOS Provinsi, disertakan pula daftar sekolah\manajemen\ponpes yang menolak BOS.
- d. Penyaluran dana BOS :
 - 1) Penyaluran dana untuk periode bulan Januari - Desember dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan :
 - Dana BOS disalurkan tiap periode 3 bulan
 - Dana BOS disalurkan pada awal bulan dari setiap periode 3 bulan.
 - 2) Penyaluran dana dilaksanakan oleh tim tingkat Provinsi melalui Bank Pemerintah\Pos dengan tahap – tahap sebagai berikut:

- Tim manajemen BOS Provinsi mengajukan surat permohonan pembayaran langsung (SPP-LS) dana BOS sesuai dengan kebutuhan.
- Unit terkait pada dinas pendidikan Provinsi\kanwil depag Provinsi melakukan verifikasi atas SPP-LS dimaksud, kemudian menerbitkan surat perintah membayar langsung (SPP-LS)
- Dinas pendidikan Provinsi\kanwil depag Provinsi selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud kepada KPPN Provinsi
- KPPN melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang diterbitkan kepada rekening Kas Negara
- Dana BOS yang telah dicairkan dari KPPN ditampung ke rekening penampung tim manajemen BOS Provinsi yang selanjutnya dana disalurkan ke sekolah penerima BOS melalui kantor Bank Pemerintah/Pos yang tunjuk sesuai dengan perjanjian kerja sama

antara dinas pendidikan Provinsi/kanwil Depag Provinsi dan Lembaga Penyalur (Bank/Pos). Perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan untuk periode sebelumnya dapat digunakan/diperpanjang atau diperbaiki apabila perlu. Tim manajemen BOS Provinsi harus melakukan evaluasi terhadap kinerja Bank penyalur.

- Tim manajemen BOS Kabupaten/kota dan sekolah harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan oleh kantor Pos/bank dengan alokasi BOS yang ditetapkan oleh manajemen BOS kabupaten/kota. jika terdapat perbedaan dalam jumlah dana yang diterima, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada kantor Pos/Bank, tim manajemen BOS kabupaten/kota dan tim manajemen BOS propinsi untuk diselesaikan lebih lanjut
- Jika dana BOS diterima oleh sekolah lebih besar dari jumlah yang seharusnya, misalnya

akibat dari kesalahan data jumlah siswa, maka sekolah harus segera mengembalikan kelebihan dana BOS tersebut ke rekening Tim manajemen BOS Provinsi. Secara teknis mekanisme pengembalian dana tersebut diatur oleh manajemen BOS Provinsi dan lembaga penyalur

- Jika ada siswa pindah atau mutasi ke sekolah lain setelah semester berjalan maka dana BOS siswa tersebut dalam semester berjalan menjadi hak sekolah atau madrasah yang lama
- Jika pada tahun anggaran, masih terdapat sisa dana BOS di rekening penampung tim manajemen BOS Provinsi akibat dari kelebihan pencairan dana atau pengembalian dari sekolah, selama hak seluruh sekolah penerima dana BOS telah terpenuhi maka dana tersebut harus dikembalikan di kas Negara.

- Bunga bank atau jasa giro akibat adanya dana rekening penampungan manajemen BOS Provinsi harus disetor ke - Kas Negara.

9.3 Mekanisme Pengambilan Dana BOS

- a. Tim manajemen BOS Provinsi menyerahkan data rekening sekolah dan besar dana yang harus disalurkan kepada lembaga penyalur dana.
- b. Selanjutnya lembaga penyalur dana yang ditunjuk menstransfer dana sekaligus ke setiap rekening sekolah dan masuk ke Pos penerimaan di dalam RAPBS.
- c. Pengembalian dana BOS dilakukan para sekolah dengan diketahui oleh komite SD tersebut dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisihkan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis Rekomendasi atau persetujuan dari pihak mana

pun sehingga menghambat pengambilan dana dan jalannya kegiatan operasional sekolah.

- d. Dana BOS harus diterima secara utuh sesuai dengan SK alokasi yang dibuat oleh tim manajemen BOS kabupaten/kota, dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.**
- e. Penyaluran dana BOS secara bertahab (3 bulanan) bukan berarti dana harus dihabiskan dalam periode tersebut. Besar penggunaan tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagai mana tertuang dalam RAPBS.**
- f. Bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir tahun pelajaran atau tahun anggaran maka dana tersebut tetap milik kas sekolah tidak disetor dikas negara.**

9.4 Kegunaan Dana BOS

Dana BOS ini oleh sekolah wajib dikelola dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung proses belajar-mengajar dengan adanya dana BOS ini siswa-siswi dibebaskan dari pembayaran iuran sekolah gratis. Dana BOS digunakan untuk :

- a. Biaya pendaftaran siswa baru, ini mulai tahun 2006.
- b. Pembelian buku-buku pelajaran untuk koleksi buku perpustakaan
- c. Pembelian bahan praktek dan ATK
- d. Pembelian barang-barang kegiatan sekolah
- e. Untuk perbaikan sarana sekolah
- f. Pembiayaan listrik dan telepon
- g. Pembayaran honor guru
- h. Pembelian alat peraga seperti peta dan globe

Menurut aturan yang ada dalam buku panduan penggunaan dana BOS hanya boleh digunakan untuk:

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru.

- b. Pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk koleksi perpustakaan.**
- c. Pembelian bahan-bahan habis pakai (buku tulis, kapur tulis, pensil, dll)**
- d. Pembiayaan kegiatan kesiswaan (olahraga, karya ilmiah, kesenian, dll)**
- e. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, dll**
- f. Pengembangan profesi guru (pelatihan, MGMP)**
- g. Pembiayaan perawatan sekolah (pengecatan, perbaikan atap, dll)**
- h. Pembiayaan langganan daya dan jasa.**
- i. Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak dibiayai oleh pemerintah dan/pemerintah daerah. Tambahan intensif bagi guru PNS ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.**
- j. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin.**

k. Pembiayaan pengelolaan BOS (ATK, penggandaan surat-menyurat atau penyusun laporan)

Dana BOS tidak diperbolehkan untuk :

- 1) Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.**
- 2) Dipinjamkan pada pihak lain.**
- 3) Membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan murid.**
- 4) Membangun gedung atau ruangan baru.**
- 5) Membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.**
- 6) Menanamkan saham.**
- 7) Membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah Pusat/Daerah, misalnya guru kontrak/guru Bantu dan kelebihan jam mengajar**

BAB V
HASIL PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Salah satu Program pemerintah yang dirancang untuk mengurangi beban masyarakat miskin adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS), melalui program BOS Pemerintah memberikan dana ke-sekolah-sekolah antara lain SMP Negeri maupun SMP swasta yang bersedia memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam program BOS. Secara konseptual Program BOS berbeda dengan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan SMP diberikan dalam bentuk bea siswa sedangkan bagi siswa miskin yang dikenal dengan sebutan Bantuan Khusus Murid (BKM). Jumlah siswa miskin yang mendapat BKM pada tahun ajaran 2005/2006 sekitar 24% siswa untuk Sekolah Menengah Pertama, tiap siswa memperoleh bea siswa yang diberikan langsung kepada siswa terpilih (diseleksi oleh sekolah) sebesar Rp.120.000,- yang disalurkan melalui Kantor Pos yang ditunjuk. Program BOS ini telah mengadopsi pendekatan yang berbeda dengan Bantuan Khusus Murid (BKM) karena dana BOS tidak diberikan langsung kepada siswa miskin tetapi diberikan kepada sekolah dan dikelola

oleh sekolah. Jumlah dana BOS yang diberikan ke-sekolah dihitung berdasarkan jumlah murid yang ada dimasing-masing sekolah, sehingga dana BOS yang diterima tiap sekolah tidak sama atau bervariasi. Adapun ketentuan besaran dana BOS untuk tingkat SMP sebesar Rp. 354.000,00 /per-siswa/tahun atau rata rata tiap bulan Rp. 29.500,00

Adapun tujuan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin / tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Berkaitan dengan tujuan penelitian tersebut di atas, pada bagian ini dipaparkan data hasil penelitian dari jawaban responden yang dilakukan melalui kuesioner yang telah didistribusikan kepada 30 Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagai sampel sedangkan populasi 41 Sekolah Menengah Negeri Kota Semarang. Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan Program BOS telah dideskripsikan data-data dan interpretasi hasil penelitian sebagai berikut :

A. Data dan Interpretasi

1. Cakupan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
 - a. Cakupan Dana BOS bagi Siswa Keluarga Miskin

Tujuan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin / tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu. Sesuai dengan tujuan program BOS tersebut di atas, dalam sub. bab. Ini akan disajikan hasil penelitian tingkat cakupan dana BOS bagi anak didik keluarga miskin yang selanjutnya untuk bahasan hasil penelitian mengenai cakupan dana BOS bagi anak didik keluarga tidak mampu akan disajikan pada sub.bab berikutnya.

Cakupan dana BOS bagi anak didik keluarga miskin berdasarkan kajian hasil data siswa yang telah disusun oleh sekolah, RAPBS dan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan BOS SMP Negeri Kota Semarang telah terungkap ternyata dari jumlah siswa/siswi keluarga miskin berkisar 20 % - 33% dari total siswa, dari total siswa miskin tersebut oleh sekolah belum dapat sepenuhnya memberikan layanan yang memadai dan akan dilakukan secara bertahap, hal ini dikarenakan terbatasnya sumber dana yang

digunakan operasional sekolah. Sumberdana sekolah yang berasal dari orang tua/wali siswa, bantuan APBD Kota Semarang maupun dari dana BOS belum dapat menjangkau memberikan layanan bagi siswa miskin berkisar secara keseluruhan, justru dengan program BOS sekolah agak bisa bernafas sehingga dapat memberikan kontribusi pengentasan kemiskinan bidang pendidikan sekitar 20 % - 25 %. Hal ini juga diperkuat hasil wawancara dengan beberapa Kepala Sekolah bahwa meskipun dana BOS belum cukup untuk seluruh operasional sekolah, akan tetapi sudah sangat membantu kelancaran operasional sekolah, bagaimanapun kenyataan dana BOS memberikan kontribusi sekolah cukup besar jika dibandingkan dengan bantuan APBD yang relatif kecil. Bentuk layanan sekolah terhadap siswa dari keluarga miskin masih terbatas pada pemberian bea siswa (khusus) yaitu pembebasan biaya SPP (Rp. 55.000 – Rp. 60.000) dan Sumbangan BP.3 yang besarnya

ditentukan oleh komite sekolah dan sampai sekarang sekolah belum dapat melaksanakan program BOS sesuai dengan juklak yang ditetapkan, diantaranya sekolah belum dapat memikirkan bantuan transportasi bagi siswa keluarga miskin karena terbatasnya dana yang tersedia untuk operasional oleh sekolah. Untuk mengetahui seberapa besar realisasi anggaran pendapatan Sekolah Menengah Pertama Negeri Semarang dapat dilihat tabel V.1 dibawah ini :

Tabel V.1
 REALISASI DAN SUMBER ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA SEKOLAH (APBS) SMP NEGERI
 KOTA SMG TAHUN 2007

NO	SEKOLAH	SUMBER DANA			JUMLAH
		BOS	APBD II	KOMITE	
1	SMP N 1	367,098,000	310,000,000	528,000,000	1,205,098,000
2	SMP N 2	340,548,000	310,000,000	528,000,000	1,178,548,000
3	SMP N 3	370,992,000	367,000,000	528,000,000	1,265,992,000
4	SMP N 4	328,512,000	275,00,000	480,480,000	808,992,000
5	SMP N 5	337,362,000	298,000,000	570,000,000	1,205,362,000
6	SMP N 6	338,778,000	287,000,000	516,120,000	1,141,898,000
7	SMP N 7	267,624,000	345,000,000	396,000,000	1,008,624,000
8	SMP N 8	286,740,000	234,000,000	452,100,000	972,840,000
9	SMP N 9	333,822,000	323,000,000	545,760,000	1,202,582,000
10	SMP N 10	249,216,000	312,000,000	398,640,000	959,856,000
11	SMP N 11	266,562,000	325,000,000	397,980,000	989,542,000
12	SMP N 12	270,810,000	231,000,000	438,900,000	940,710,000
13	SMP N 13	297,360,000	324,000,000	488,400,000	1,109,760,000
14	SMP N 14	334,176,000	365,000,000	491,040,000	1,190,216,000
15	SMP N 15	338,070,000	356,000,000	498,300,000	1,192,370,000
16	SMP N 16	274,350,000	265,000,000	445,500,000	984,850,000

17	SMP N 17	243,906,000	276,000,000	388,740,000	908,646,000
18	SMP N 18	323,556,000	312,000,000	570,240,000	1,205,796,000
19	SMP N 19	334,530,000	318,000,000	491,700,000	1,144,230,000
20	SMP N 20	280,368,000	298,000,000	423,720,000	1,002,088,000
21	SMP N 21	335,946,000	317,000,000	494,340,000	1,147,286,000
22	SMP N 22	281,430,000	298,000,000	590,700,000	1,170,130,000
23	SMP N 23	284,970,000	317,000,000	465,300,000	1,067,270,000
24	SMP N 24	245,676,000	391,000,000	425,040,000	1,061,716,000
25	SMP N 25	245,676,000	287,600,000	392,040,000	925,316,000
26	SMP N 26	264,438,000	300,300,000	427,020,000	991,758,000
27	SMP N 27	302,316,000	331,000,000	464,640,000	1,097,956,000
28	SMP N 28	277,890,000	268,000,000	452,100,000	997,990,000
29	SMP N 29	328,512,000	378,000,000	480,480,000	1,186,992,000
30	SMP N 30	328,512,000	376,500,000	480,480,000	1,185,492,000

Sumber : diolah dari APBS SMP.N, 2007 Kota Semarang

NO	SEKOLAH	SUMBER DANA			JUMLAH
		BOS	APBD II	KOMITE	
31	SMP N 31	234,348,000	234,000,000	370,920,000	839,268,000
32	SMP N 32	260,544,000	255,000,000	419,760,000	935,304,000
33	SMP N 33	281,430,000	218,000,000	458,700,000	958,130,000
34	SMP N 34	317,538,000	219,600,000	526,020,000	1,063,158,000
35	SMP N 35	53,808,000	167,000,000	87,120,000	307,928,000
36	SMP N 36	312,936,000	345,000,000	484,440,000	1,142,376,000
37	SMP N 37	279,306,000	208,000,600	454,740,000	942,046,600
38	SMP N 38	158,592,000	256,000,000	269,280,000	683,872,000
39	SMP N 39	381,258.00	412,300,000	545,820,000	958,501,258.00
40	SMP N 40	252,756,000	290,700,000	372,240,000	915,696,000
41	SMP N 41	105,846,000	257,000,600	180,840,000	543,686,600
	JUMLAH	11,337,231,258	11,983,001,200	18,419,640,000	41,739,872,458

Sumber : diolah dari APBS SMP.N, 2007 Kota Semarang

Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat cakupan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi siswa dan siswi dari

keluarga miskin di SMP Negeri Kota Semarang dapat disajikan tabel V.2 tersebut di bawah ini.

Tabel V.2
JUMLAH SISWA MISKIN SMP. NEGERI KOTA SEMARANG
YANG TERLAYANI DANA BOS, 2007

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH SISWA	JUMLAH SISWA MISKIN DAN TOTAL SISWA YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KHUSUS		(%)
			JUMLAH SISWA MISKIN	JML SISWA MISKIN YANG TERLAYANI	
1	SMP Negeri 1	1.037	275	237	86,18
2	SMP Negeri 2	962	190	162	85,26
3	SMP Negeri 3	1.048	275	248	90,18
4	SMP Negeri 4	928	265	200	75,00
5	SMP Negeri 5	953	200	160	80,00
6	SMP Negeri 6	957	250	175	70,00
7	SMP Negeri 7	756	200	156	78,00
8	SMP Negeri 8	810	175	125	71,00
9	SMP Negeri 9	943	276	185	67,00
10	SMP Negeri 10	704	200	100	50,00
11	SMP Negeri 11	753	200	150	75,00
12	SMP Negeri 12	765	150	100	66,00
13	SMP Negeri 13	840	175	100	57,00
14	SMP Negeri 14	944	200	200	100,00
15	SMP Negeri 15	955	250	200	80,00
16	SMP Negeri 16	775	155	100	64,00
17	SMP Negeri 17	689	100	100	100,00
18	SMP Negeri 18	914	225	150	66,00
19	SMP Negeri 19	945	275	200	72,00
20	SMP Negeri 20	792	150	150	100,00
21	SMP Negeri 21	949	200	200	100,00

22	SMP Negeri 22	795	150	100	66,00
23	SMP Negeri 23	805	150	100	66,00
24	SMP Negeri 24	694	100	50	50,00
25	SMP Negeri 25	694	125	100	80,00
26	SMP Negeri 26	747	150	100	66,00
27	SMP Negeri 27	854	223	150	67,00
28	SMP Negeri 28	785	230	100	43,00
29	SMP Negeri 29	928	236	200	84,00
30	SMP Negeri 30	928	300	200	66,00
31	SMP Negeri 31	662	125	100	80,00
32	SMP Negeri 32	736	126	100	79,00
33	SMP Negeri 33	795	125	100	80,00
34	SMP Negeri 34	897	125	100	80,00
35	SMP Negeri 35	152	20	20	100,00
36	SMP Negeri 36	884	240	150	62,00
37	SMP Negeri 37	789	200	100	50,00
38	SMP Negeri 38	448	40	40	100,00
39	SMP Negeri 39	1.077	280	250	89,00
40	SMP Negeri 40	714	150	150	100,00
41	SMP Negeri 41	299	25	25	100,00
	Jumlah	29.943	7506	5633	

Sumber : data siswa dan realisasi APBS,2007

Tabel V.2 di atas, menggambarkan totalitas siswa miskin adalah 7.506 siswa, dari jumlah tersebut siswa miskin yang sudah mendapatkan layanan dana BOS adalah 5.633 siswa atau (75%) sedangkan jumlah siswa miskin yang belum mendapatkan layanan adalah 1.873 siswa atau (25 %). Selain cakupan siswa miskin yang terhitung belum seluruhnya mendapatkan pelayanan pendidikan secara memadai, juga bantuan khusus bagi siswa miskin belum semua sekolah dapat merealisasikan. Contoh dari 41 SMP Negeri Kota Semarang belum ada yang

memberikan bantuan uang saku atau transport bagi siswa miskin.

Pada hal jumlah tersebut tiap tahun akan mengalami kenaikan hal ini dapat terealisasi karena adanya program BOS disisi lain sekolah menerapkan manajemen Subsidi silang bagi orang tua murid yang mampu untuk membantu mengangkat bagi siswa kurang mampu/miskin. Dengan demikian diharapkan program BOS akan benar-benar dapat memberikan akses yang luas bagi siswa dari keluarga miskin maupun siswa yang tidak mampu untuk dapat menyelesaikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun secara berkualitas. Hasil kajian dokumen laporan pertanggung jawaban keuangan BOS ternyata dana BOS telah memberikan andil yang sangat besar terhadap pendidikan di daerah, berdasarkan hasil kajian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BOS dari 10 sekolah sampel, ternyata dana BOS menopang Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Sekolah (RAPBS) rata-rata 25% - 30% dari jumlah rencana anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan oleh sekolah untuk lebih jelas lihat (tabel V.1 realisasi anggaran halaman 81) tersebut di atas. Hal tersebut di atas dapat diperkuat hasil survei tentang kontribusi BOS terhadap siswa/siswi miskin atau tidak mampu yang disajikan tabel V.3 berikut :

Tabel V. 3
KONTRIBUSI PROGRAM BOS
TERHADAP SISWA/SISWI KURANG MAMPU/MISKIN

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. sangat membantu	10	33,3
2	b. membantu	13	43,4
3	c. cukup membantu	7	23,3
4	d. kurang membantu	-	-
5	e. tidak membantu	-	-
	Jumlah	30	100

Di olah dari pertanyaan no.9

Berdasarkan tabel V.3 tersebut di atas menggambarkan dari 30 responden, sebagian besar yaitu 13 reponden atau (43,3%) menyatakan bahwa program BOS ternyata membantu meringankan beban siswa/siswi kurang mampu, sedangkan urutan kedua 10

responden atau (33,%) menyatakan bahwa program sangat membantu bagi siswa/siswi kurang mampu, sisanya 7 responden menyatakan bahwa program cukup membantu siswa/siswi kurang mampu. Dengan memperhatikan dominasi jawaban tersebut telah dapat kami simpulkan bahwa program BOS oleh sekolah sangat membantu bagi keluarga siswa/siswi kurang mampu/miskin. Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP. Negeri 4 Semarang dari jumlah siswa 928 orang sebanyak 200 siswa atau mencapai berkisar 20% dari jumlah siswa yang diberikan bea siswa dalam bentuk dibebaskan dari segala biaya seperti, uang bantuan gedung, SPP terkecuali biaya untuk rencana tour sekolah yang dinikmati oleh anak itu sendiri.

b. Cakupan Dana BOS bagi Siswa Keluarga Tidak Mampu

Salah satu tujuan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi

siswa yang tidak mampu agar mereka dapat memperoleh layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu. Searah dengan tujuan program BOS setelah pada sub.bab tersebut di atas telah memaparkan hasil kajian cakupan dana BOS bagi anak didik dari keluarga miskin selanjutnya pada sub.bab ini akan disajikan hasil penelitian tingkat cakupan dana BOS bagi anak didik keluarga yang tidak mampu. Setelah pada sub.bab di atas kita mencermati tingkat cakupan dana BOS Bagi siswa siswi dari keluarga miskin di Kota Semarang pada SMP Negeri, sesuai arah dan tujuan dana BOS kajian penelitian selanjutnya adalah untuk mengetahui seberapa besar cakupan dana BOS bagi siswa untuk keluarga tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar.

Berdasarkan kajian data siswa yang disusun oleh sekolah, telah ditemukan atau terungkap masih adanya siswa/siswi dari keluarga tidak mampu sebesar yang belum memperoleh layanan pendidikan dasar secara memadai. Hasil kajian dari total siswa 29.943 anak ternyata terdapat sekitar 8% atau 2.386 siswa keluarga tidak mampu, dari jumlah 2.386

anak tersebut ternyata baru 1365 anak yang sudah memperoleh layanan atau sekitar 57% sedangkan sisanya 1021 anak atau sekitar 43% belum mendapatkan layanan pendidikan dasar dengan memadai.

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP.Negeri 9 dan SMP Negeri 4 Kota Semarang yang menjadi responden dalam penelitian ini, memberikan tanggapan bahwa program BOS ternyata dapat membebaskan biaya pendidikan bagi siswa/siswi yang tidak mampu. Hasil penelitian ini juga diperkuat hasil wawancara dengan Drs. Sri Santoso Kepala Dinas Pendidikan yang merangkap sebagai Ketua Tim Manajemen BOS Kota Semarang bahwa program BOS jika implemetasinya dilaksanakan dengan konsisten dan komitmen sesuai dengan Buku Panduan BOS ketentuan akan dapat membebaskan biaya pendidikan bagi siswa/siswi tidak mampu atau miskin. Pernyataan Kepala Dinas atau Ketua Tim Manajemen BOS tersebut telah dipertajam hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Menengan Pertama Negeri 21 yang memperkuat bahwa pelaksanaan program BOS yang selama ini sudah dilaksanakan ternyata dapat meringankan bagi

siswa/siswa yang tidak mampu hanya saat ini belum dapat menjangkau secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian dokumentasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun 2007 dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Sekolah tahun 2007 diantaranya SMP. Negeri 4, SMP. Negeri 9, SMP. Negeri 21, SMP. Negeri 34 dan SMP. Negeri 3 Kota Semarang yang menjadi sampel penelitian, dari dokumentasi tersebut setelah kami lakukan kajian ternyata masing-masing sekolah tersebut sudah mampu membebaskan bagi siswa/siswi yang tidak mampu/miskin. Dari kelima SMP. Negeri 4 yang menjadi sampel tersebut mempunyai potensi anggaran untuk membebaskan siswa/siswi tidak mampu/miskin yang bervariasi yaitu antara 15 % - 20 % dari jumlah siswa yang ada atau berkisar rata-rata 200 siswa tiap sekolah. Untuk mengetahui realisasi sumber anggaran pendapatan dan belanja sekolah dapat dilihat

tabel V.1 (halaman 81) tersebut di atas. Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar cakupan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap siswa dari keluarga tidak mampu secara detail telah disajikan data tabel V.4 tersebut di bawah ini :

Tabel V.4
JUMLAH SISWA TIDAK MAMPU SMP. NEGERI EMARANG
YANG TERLAYANI DANA BOS, 2007

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH SISWA	JML SISWA TDK MAMPU YANG MENDAPATKAN LAYANAN KHUSUS		(%)
			JUMLAH SISWA	JML SISWA YANG TERLAYANI	
1	SMP Negeri 1	1,037	75	37	49,33
2	SMP Negeri 2	962	90	62	68,88
3	SMP Negeri 3	1,048	75	48	64,00
4	SMP Negeri 4	928	65	40	61,53
5	SMP Negeri 5	953	45	30	66,66
6	SMP Negeri 6	957	50	25	50,00
7	SMP Negeri 7	756	40	10	25,00
8	SMP Negeri 8	810	75	25	33,33
9	SMP Negeri 9	943	76	35	46,05
10	SMP Negeri 10	704	50	30	60,00
11	SMP Negeri 11	753	60	30	50,00
12	SMP Negeri 12	765	50	30	60,00
13	SMP Negeri 13	840	75	40	53,33
14	SMP Negeri 14	944	60	40	66,66
15	SMP Negeri 15	955	40	20	50,00
16	SMP Negeri 16	775	55	35	63,63
17	SMP Negeri 17	689	40	20	50,00
18	SMP Negeri 18	914	55	20	36,00
19	SMP Negeri 19	945	75	35	46,00
20	SMP Negeri 20	792	50	23	46,00
21	SMP Negeri 21	949	60	35	58,00
22	SMP Negeri 22	795	50	40	80,00
23	SMP Negeri 23	805	60	40	66,00

24	SMP Negeri 24	694	80	50	62,00
25	SMP Negeri 25	694	80	50	62,00
26	SMP Negeri 26	747	70	40	57,00
27	SMP Negeri 27	854	70	40	57,00
28	SMP Negeri 28	785	70	40	57,00
29	SMP Negeri 29	928	50	25	50,00
30	SMP Negeri 30	928	60	25	41,00
31	SMP Negeri 31	662	75	40	53,00
32	SMP Negeri 32	736	45	35	77,00
33	SMP Negeri 33	795	55	35	63,00
34	SMP Negeri 34	897	65	40	61,00
35	SMP Negeri 35	152	20	20	100,00
36	SMP Negeri 36	884	60	40	66,00
37	SMP Negeri 37	789	50	20	40,00
38	SMP Negeri 38	448	15	15	100,00
39	SMP Negeri 39	1.077	80	50	62,00
40	SMP Negeri 40	714	50	30	60,00
41	SMP Negeri 41	299	20	20	100,00
	Jumlah	29.943	2.386	1.365	-

Sumber data : diolah Dok realisasi APBS,2007

Berdasarkan tabel V.4 di atas, menggambarkan bahwa total siswa tidak mampu yang tersebar di seluruh SMP Negeri Kota Semarang sebanyak 2386 siswa dan yang telah mendapatkan layanan pendidikan dasar baru sebanyak 1365 anak. Dari jumlah tersebut kemungkinan untuk tahun yang akan datang akan mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang terus mengalami penurunan akibat kenaikan BBM. Upaya sekolah untuk tetap dapat memberikan layanan pendidikan secara

memadai, selain dukungan dana BOS, sekolah telah menerapkan Manajemen Subsidi Silang. Artinya bagi orang tua murid yang mampu untuk membantu mengangkat bagi siswa miskin/kurang mampu. Hal ini dilakukan karena dana BOS dan bantuan APBD yang diberikan kepada sekolah tidak mencukupi untuk operasional sekolah. Guna mengatasi permasalahan dana tersebut peran serta orang tua/wali murid tetap diharapkan yang diwujudkan dalam bentuk sumbangan SPP maupun sumbangan BP.3. Meskipun demikian berdasarkan wawancara dengan beberapa Kepala Sekolah SMP Negeri, yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima oleh sekolah cukup dominan dalam memberikan akses yang luas bagi keluarga kurang mampu dalam menyelesaikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun secara berkualitas. Hal ini dibuktikan adanya kajian dokumen laporan pertanggung jawaban keuangan BOS ternyata

dana BOS telah memberikan andil yang sangat besar terhadap pendidikan di daerah dalam mendukung siswa tidak mampu.

2. Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Program BOS

Dalam aturan BOS penyelenggaraan program BOS tidak secara tegas ditentukan apakah BOS untuk subsidi umum atau subsidi khusus yang diarahkan untuk siswa miskin. Hasil kajian memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaannya BOS cenderung diperlakukan sebagai subsidi umum untuk membiayai kegiatan operasional sekolah dan semua murid menerima manfaat program BOS. Secara konseptual, sekolah memegang kunci dalam penentuan penggunaan BOS termasuk dalam kebijakan pemberian bantuan khusus untuk siswa miskin. Berdasarkan ketentuan (panduan BOS) dana BOS di kelola oleh Kepala Sekolah, Guru/tenaga administrasi. Uang dikirim langsung ke nomor rekening sekolah oleh BRI sebagai lembaga penyalur yang ditentukan Tim Manajemen Provinsi. Sekolah boleh menggunakan BOS tersebut dengan berbagai jenis kegiatan berdasarkan RAPBS yang disusun oleh sekolah dan komite sekolah, RAPBS sebagai persyaratan untuk menerima BOS harus mendapat persetujuan Ketua Komite Sekolah. Namun, hasil

kajian yang dilaksanakan oleh peneliti memperlihatkan betapa besar dominasi Kepala Sekolah dalam penyusunan RAPBS maupun dalam pengelolaan dana BOS hal ini terjadi hampir seluruh sekolah. Guru dan orang tua wali murid hampir tidak pernah diajak dalam proses penyusunan RAPBS, sedangkan Komite sekolah umumnya hanya ikut menandatangani RAPBS yang telah disusun sekolah. Hal yang demikian inilah menjadikan fungsi kontrol belum dapat berjalan secara efektif. Berdasarkan hasil kajian dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BOS dari 41 SMP.Negeri hampir sebagian besar dana BOS dimanfaatkan untuk kegiatan, membayar tenaga honorer, GTT, PTT dan Tenaga Harlep, Belanja barang dan jasa, Kegiatan Belajar mengajar, Kegiatan Kesiswaan, Kegiatan Pemeliharaan. Dari komponen tersebut pos yang paling besar adalah (30%) untuk pembayaran tenaga honorer /GTT/ PTT, Tenaga Harlep, (25%) untuk belanja barang jasa dan (20%). untuk kegiatan belajar mengajar, (15%). kegiatan kesiswaan dan (10%) dan pemeliharaan gedung. Untuk mengetahui perincian pemanfaatan dana BOS oleh Sekolah disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel V.5
TINGKAT PROSENTASE PENGGUNAAN
DANA BOS SMP. NEGERI KOTA SEMARANG
TAHUN 2007

--	--	--	--

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (Dalam rupiah)	KETERANGAN
1	Belanja Pegawai	3.515.432.400	Pembayaran tenaga Honorer, GTT, PTT dan Tenaga Harlep
2	Belanja Barang dan Jasa	2.929.527.000	ATK, bayar telepon, listrik, penggunaan dll.
3	Kegiatan Belajar mengajar	2.343.621.600	Tes smester, Membuat soal ujian, Ujian akhir smester, remedial dll.
4	Kegiatan kesiswaan	1.757.716.200	Kegiatan Osis, Kegiatan kesiswaan, Lomba, pramuka dll.
5	Kegiatan pemeliharaan gedung	1.171.810.800	Rehab gedung, Perbaikan kamar mandi/wc, lapangan Basket dll.
	JUMLAH	11. 718.108.000	

Sumber : diolah dari Laporan Pertanggungjawaban BOS, 2007

Berdasarkan tabel tersebut di atas, memperlihatkan bahwa pemanfaatan dana BOS oleh 41 sekolah SMP.Negeri Kota Semarang ternyata sebagian besar bantuan BOS digunakan untuk membayar tenaga honorer guru/GTT/PTT/Harlep dan urutan kedua adalah untuk pembelian barang dan jasa sedangkan yang ketiga adalah kegiatan belajar mengajar. Sekolah belum sepenuhnya menggunakan dana BOS sesuai dengan juklak karena secara riil dilapngan masih dana BOS yang digunakan seperti Pemberian transportasi siswa miskin belum dilaksanakan, Untuk transportasi lomba guru, Untuk bayar tenaga

harlep yang sudah dibiayai PEMDA, Penerimaan Murid masih dikenakan berbagai pungutan dengan berbagai alasan seperti (stopmap Rp.5000,-), Rehab gedung, Pembelian peralatan yang tidak terkait dengan proses pendidikan komputer, Perbaikan Pagar depan sekolah yang seharusnya hal ini tidak boleh terjadi.

Adapun dampak pelaksanaan BOS ternyata bagi sekolah sangat positif, untuk mengetahui dampak program BOS peneliti melakukan pengumpulan data kuantitatif hasilnya secara umum bahwa BOS dapat memperkuat kemampuan sekolah dalam memberikan materi pembelajaran dan kegiatan tambahan kepada siswa dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Dari 41 SMP. Negeri yang menjadi sampel menyatakan bahwa, dana BOS meningkatkan jumlah penerimaan dana sekolah, bagi yang muridnya banyak jumlah penerimaan sangat signifikan, meskipun penambahan penerimaan tiap sekolah berbeda. Dalam banyak hal BOS mengurangi keterbatasan

anggaran sekolah dan dengan demikian dapat meningkatkan kapasitas sekolah untuk memenuhi biaya operasional sekolah. Oleh karena itu beberapa komponen yang semula dibebankan orang tua siswa melalui SPP menjadi berkurang, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa dampak program ternyata dapat mengurangi beban biaya bagi orang tua / wali murid.

Sedangkan dampak yang dirasakan oleh sekolah dengan adanya program BOS antara lain ; adanya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana pendidikan hal ini akan dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar siswa, dampak yang dirasakan oleh siswa adalah adanya beban biaya sekolah menjadi lebih berkurang, seperti di Semarang secara umum untuk biaya SPP tiap anak sebelum ada program BOS rata-rata berkisar Rp. 90.000,- setelah adanya BOS berkurang menjadi Rp. 55.000,- sehingga mengurangi beban biaya tiap siswa Rp. 35.000,- atau berkisar 30% - 35%. Sedangkan dampak lain adalah dengan adanya

program BOS, alokasi sekolah untuk bantuan khusus bagi siswa miskin atau tidak mampu cukup besar yakni berkisar rata-rata 15 % - 20 % dari jumlah siswa keseluruhan. Berdasarkan hasil evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BOS dari sekolah yang menjadi sampel dan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP. Negeri 4 Semarang yang menyatakan bahwa mulai tahun ajaran 2006 / 2007 Sekolah mengalokasikan bantuan khusus bagi siswa tidak/kurang mampu berkisar 20% dari jumlah siswa sebanyak 928 anak yaitu sebanyak 200 anak tidak/kurang mampu yang diberikan dalam bentuk bea siswa bebas dari segala biaya sekolah (gratis, kecuali biaya tour/wisata siswa.). Dari jumlah tersebut tiap tahun akan mengalami kenaikan hal ini dapat terealisasi karena adanya program BOS disisi lain sekolah menerapkan manajemen Subsidi silang bagi orang tua murid yang mampu untuk membantu mengangkat bagi siswa kurang mampu/miskin. Dengan demikian diharapkan program BOS akan benar-benar dapat

mememberikan akses yang luas bagi keluarga kurang tidak mampu sehingga dapat menyelesaikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun secara berkualitas.

Hasil kajian dokumen laporan pertanggung jawaban keuangan BOS ternyata dana BOS telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap pendidikan di daerah, berdasarkan hasil kajian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BOS dari 10 sekolah sampel, ternyata dana BOS menopang RAPBS rata-rata 25% - 30% dari jumlah rencana anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan oleh sekolah. Karena untuk RAPBS SMP. Negeri Kota Semarang rata-rata sekitar 1,5 s/d 1,8 milyar. Untuk biaya pendidikan per-siswa idealnya berkisar Rp. 90.000 – Rp. 100.000 tiap bulan. Sebagai bukti BOS mempunyai dampak terhadap sekolah hal ini diperkuat dari hasil suvei terhadap responden tentang tingkat manfaat / daya dukung BOS dapat kita lihat tabel V.6 berikut ini :

Tabel V. 6

TINGKAT DAYA DUKUNG
PROGRAM BOS TERHADAP SEKOLAH

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. sangat mendukung	18	60
2	b. mendukung	10	33,3
3	c. cukup mendukung	2	6,7
4	d. kurang mendukung	-	-
	e. tidak memadai	-	-
5	Jumlah	30	100

Di olah dari pertanyaan no.2

Atas dasar tabel V.6 di atas, menunjukkan bahwa dari 30 SMP.Negeri yang menjadi responden dalam penelitian ini, terungkap bahwa sebagian besar yaitu 18 reponden atau (60%) menyatakan bahwa program BOS sangat mendukung untuk kegiatan pendidikan sekolah selanjutnya untuk 10 responden atau (33,3%) menyatakan setuju dan sisanya 2 responden atau (6,7%) menyatakan cukup setuju. Meskipun dilihat jawaban responden tersebut bervariasi akan tetapi dapat kita simpulkan ternyata program BOS sangat mendukung keuangan sekolah, dengan demikian diharapkan kegiatan belajar mengajar siswa akan dapat lebih meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu ternyata program BOS

mempunyai korelasi yang signifikan terhadap peningkatan intensitas kegiatan anak didik di sekolah. Untuk mengetahui tingkat intensitas kegiatan siswa yang dapat dilihat pada tabel V.7 berikut :

Tabel V. 7
TINGKAT INTENSITAS KEGIATAN
ANAK DIDIK DISEKOLAH

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. sangat menunjang	15	50,0
2	b. menunjang	10	33,3
3	c. cukup menunjang	5	16,7
4	d. kurang menunjang	-	-
5	e. tidak menunjang	-	-
	Jumlah	30	100

Di olah dari pertanyaan no.3

Menurut tabel V.7 di atas, mengindikasikan bahwa dari 30 SMP.Negeri yang menjadi responden dalam penelitian ini, telah terungkap sebagian besar yaitu 15 responden atau (50%) memberikan alternatif jawaban sangat menunjang, artinya program BOS dapat meningkatkan intensitas kegiatan belajar mengajar, sedangkan sebagian responden 10 responden atau (33,3%) menyatakan menunjang dan sisanya 5 responden atau (16,7%) menyatakan cukup menunjang. Dari jawaban responden beragam, akan tetapi meskipun demikian jawaban dapat kita simpulkan bahwa kenyataan dilapangan program BOS dapat

meningkatkan intensitas kegiatan belajar maupun kegiatan ekstra kurikuler sekolah. Indikator output juga dapat dilihat dari kemampuan sekolah untuk meringankan beban anggaran sekolah yang selama ini dirasakan jauh dari kecukupan .

3. Potensi BOS dalam Perluasan Akses Pendidikan

Meskipun belum semua siswa miskin maupun siswa tidak mampu dapat memperoleh layanan pendidikan secara memadai yang berasal dari dana BOS, akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua siswa, termasuk siswa miskin maupun siswa tidak mampu mendapat manfaat dari dana BOS, diantaranya dalam bentuk pembebasan uang SPP berkisar Rp. 55.000,- bagi siswa miskin dan siswa tidak mampu mendapatkan pengurangan 50% dari besarnya iuran sekolah atau SPP. Oleh karena cakupan program BOS lebih luas dan merata, dan semua siswa terutama siswa miskin / tidak mampu dipastikan akan menerima manfaatnya. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa karena besarnya/luasnya cakupan sasaran Program BOS

dan kecenderungan adanya kepastian bahwa siswa miskin akan mendapatkan manfaat berupa biaya sekolah akan lebih murah. Hal ini juga dipekuat hasil wawancara dengan beberapa Kepala Sekolah yang diperkuat dengan pernyataan orang tua siswa yang anaknya menerima BOS meskipun semua siswa menerima manfaat Program BOS, akan lebih tepat jika sekolah memberikan manfaat tambahan bagi siswa miskin. Meskipun BOS sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin, akan tetapi sekolah belum melaksanakan mekanisme penentuan siswa miskin secara transparan. Selama sekolah hanya berdasarkan surat keterangan dari ketua RT, RW yang sahkan pihak kelurahan. Akan lebih transparan dan tepat sasaran apabila sekolah melakukan mekanisme penentuan siswa miskin dilakukan dengan pengisian formulir data pekerjaan yang mencakup penghasilan orang tua, selanjutnya dilakukan kunjungan ke rumah orang tua siswa yang di duga miskin (home visit) untuk verifikasi oleh tim kecil yang dibentuk oleh sekolah. Hasil

verifikasi dapat digolongkan menjadi 2 katagori yakni : siswa tergolong miskin 100% dan siswa tergolong agak miskin dengan bantuan 50%. Sehingga terlihat bahwa BOS untuk meningkatkan akses pendidikan bagis siswa miskin atau bagi anak usia sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin. Untuk mengetahui seberapa peran BOS dalam memberikan sumbangan pendidikan kota semarang dapat dilihat perbandingan anggaran pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang, dana BOS dan dana yang bersumber dari iuran orang tua/wali murid yang dihimpun melalui Komite sekolah disajikan tabel V.8 sebagai berikut ini :

Tabel V.8
**REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA SEKOLAH (APBS) SMP NEGERI
 KOTA SMG TAHUN 2007**

NO	SEKOLAH	SUMBER DANA			JUMLAH
		BOS	APBD II	KOMITE	
1	SMP N 1	367,098,000	310,000,000	528,000,000	1,205,098,000
2	SMP N 2	340,548,000	310,000,000	528,000,000	1,178,548,000
3	SMP N 3	370,992,000	367,000,000	528,000,000	1,265,992,000
4	SMP N 4	328,512,000	275,00,000	480,480,000	808,992,000
5	SMP N 5	337,362,000	298,000,000	570,000,000	1,205,362,000
6	SMP N 6	338,778,000	287,000,000	516,120,000	1,141,898,000
7	SMP N 7	267,624,000	345,000,000	396,000,000	1,008,624,000
8	SMP N 8	286,740,000	234,000,000	452,100,000	972,840,000
9	SMP N 9	333,822,000	323,000,000	545,760,000	1,202,582,000
10	SMP N 10	249,216,000	312,000,000	398,640,000	959,856,000
11	SMP N 11	266,562,000	325,000,000	397,980,000	989,542,000
12	SMP N 12	270,810,000	231,000,000	438,900,000	940,710,000
13	SMP N 13	297,360,000	324,000,000	488,400,000	1,109,760,000
14	SMP N 14	334,176,000	365,000,000	491,040,000	1,190,216,000
15	SMP N 15	338,070,000	356,000,000	498,300,000	1,192,370,000
16	SMP N 16	274,350,000	265,000,000	445,500,000	984,850,000
17	SMP N 17	243,906,000	276,000,000	388,740,000	908,646,000
18	SMP N 18	323,556,000	312,000,000	570,240,000	1,205,796,000

19	SMP N 19	334,530,000	318,000,000	491,700,000	1,144,230,000
20	SMP N 20	280,368,000	298,000,000	423,720,000	1,002,088,000
21	SMP N 21	335,946,000	317,000,000	494,340,000	1,147,286,000
22	SMP N 22	281,430,000	298,000,000	590,700,000	1,170,130,000
23	SMP N 23	284,970,000	317,000,000	465,300,000	1,067,270,000
24	SMP N 24	245,676,000	391,000,000	425,040,000	1,061,716,000
25	SMP N 25	245,676,000	287,600,000	392,040,000	925,316,000
26	SMP N 26	264,438,000	300,300,000	427,020,000	991,758,000
27	SMP N 27	302,316,000	331,000,000	464,640,000	1,097,956,000
28	SMP N 28	277,890,000	268,000,000	452,100,000	997,990,000
29	SMP N 29	328,512,000	378,000,000	480,480,000	1,186,992,000
30	SMP N 30	328,512,000	376,500,000	480,480,000	1,185,492,000

Sumber : diolah dari APBS SMP.N, 2007 Kota Semarang

NO	SEKOLAH	SUMBER DANA			JUMLAH
		BOS	APBD II	KOMITE	
31	SMP N 31	234,348,000	234,000,000	370,920,000	839,268,000
32	SMP N 32	260,544,000	255,000,000	419,760,000	935,304,000
33	SMP N 33	281,430,000	218,000,000	458,700,000	958,130,000
34	SMP N 34	317,538,000	219,600,000	526,020,000	1,063,158,000
35	SMP N 35	53,808,000	167,000,000	87,120,000	307,928,000
36	SMP N 36	312,936,000	345,000,000	484,440,000	1,142,376,000
37	SMP N 37	279,306,000	208,000,600	454,740,000	942,046,600
38	SMP N 38	158,592,000	256,000,000	269,280,000	683,872,000
39	SMP N 39	381,258.00	412,300,000	545,820,000	958,501,258.00
40	SMP N 40	252,756,000	290,700,000	372,240,000	915,696,000
41	SMP N 41	105,846,000	257,000,600	180,840,000	543,686,600
	JUMLAH	11,337,231,258	11,983,001,200	18,419,640,000	41,739,872,458

Sumber : diolah dari APBS SMP.N, 2007 Kota Semarang

Hasil kajian dokumen Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2007 dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) tahun 2007 Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Semarang tersebut di atas, memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa Jumlah

anggaran yang terserap untuk bidang Pendidikan sebesar Rp. 41.739.872.458,- sumber dana berasal dari BOS sebesar Rp.11,337,231,258 dari APBD Kota Semarang sebesar Rp. 11,983,001,200 dan berasal dari sumbangan orang tua wali murid yang dihimpun melalui komite sekolah sebesar Rp. 18,419,640,000,-

Berdasarkan data di atas jika dihitung prosentase, maka dana BOS telah dapat memberikan kontribusi terhadap APBD Kota Semarang dalam bidang pendidikan sebesar 27 % selajutnya dana APBD sendiri memberikan kontribusi dana pendidikan sebesar 31 % dan orang tua wali murid memberikan sumbangan sebesar 42%. Dengan demikian telah dapat kita simpulkan bahwa BOS ternyata telah memberikan kontribusi pendidikan yang cukup signifikan, sehingga keberadaan program ternyata dapat mengurangi beban orang tua wali murid sebesar 27% dari total anggaran, sehingga hal ini juga meringankan biaya bagi orang tua / wali murid.

B. Diskusi

Pelaksanaan program BOS oleh sekolah SMP Negeri Kota Semarang pada dasarnya telah berjalan dengan baik, meskipun demikian dalam prakteknya masih terdapat beberapa kelemahan, hal ini dapat kita lihat

temuan praktek dilapangan yang tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan program BOS antara lain :

a. Dalam buku petunjuk pelaksanaan BOS, bahwa tujuan khusus BOS adalah untuk membantu bagi siswa/siswi keluarga miskin atau tidak mampu dimaksudkan agar mereka dapat menikmati layanan pendidikan dasar sembilan tahun dengan berkualitas. Akan tetapi kenyataan dilapangan, oleh sekolah BOS dimanfaatkan untuk subsidi umum untuk membiayai kegiatan operasional sekolah dan semua murid menerima manfaat. Akibatnya dari jumlah siswa/siswi yang berasal dari keluarga miskin maupun tidak mampu belum seluruhnya dapat memperoleh layanan pendidikan secara memadai.

b. Pemanfaatan dana BOS oleh 41 sekolah SMP.Negeri Kota Semarang ternyata sebagian besar bantuan BOS digunakan untuk membayar tenaga honorer guru/GTT/PTT/Harlep dan urutan kedua adalah untuk pembelian barang dan jasa sedangkan yang ketiga adalah kegiatan belajar mengajar. Sekolah

belum sepenuhnya menggunakan dana BOS sesuai dengan juklak karena secara riil dilapngan masih dana BOS yang digunakan seperti Pemberian transportasi siswa miskin belum dilaksanakan, Untuk transportasi lomba guru, Untuk bayar tenaga harlep yang sudah dibiayai PEMDA, Penerimaan Murid masih dikenakan berbagai pungutan dengan berbagai alasan seperti (stopmap Rp.2000,-), Rehab gedung, Pembelian peralatan yang tidak terkait dengan proses pendidikan komputer, Perbaikan Pagar depan sekolah yang seharusnya hal ini tidak boleh terjadi.

- c. Pada dasarnya sekolah dapat menggunakan dana BOS yang dilakukan dengan berbagai kegiatan yang telah disusun berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang disusun oleh sekolah bersama komite sekolah. RAPBS sebagai persyaratan untuk menerima BOS harus mendapat persetujuan Ketua Komite Sekolah, namun hasil kajian tentang pelaksanaan program BOS telah terungkap bahwa, betapa besar dominasi

peran Kepala Sekolah dalam penyusunan RAPBS maupun dalam pengelolaan dana BOS hal ini terjadi hampir seluruh sekolah. Guru dan orang tua wali murid hampir tidak pernah diajak dalam proses penyusunan RAPBS, sedangkan Komite sekolah umumnya hanya ikut menandatangani RAPBS yang telah disusun sekolah. Hal yang demikian inilah menjadikan fungsi kontrol belum dapat berjalan secara efektif. Berdasarkan hasil kajian dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BOS dari 41 SMP.Negeri hampir sebagian besar dana BOS dimanfaatkan untuk kegiatan, membayar tenaga honorer, GTT, PTT dan Tenaga Harlep, Belanja barang dan jasa, Kegiatan Belajar mengajar, Kegiatan Kesiswaan, Kegiatan Pemeliharaan. Dari komponen tersebut pos yang paling besar adalah (30%) untuk pembayaran tenaga honorer /GTT/ PTT, Tenaga Harlep, (25%) untuk belanja barang jasa dan (20%). untuk kegiatan belajar mengajar, (15%). kegiatan kesiswaan dan (10%) untuk pemeliharaan gedung (lihat tabel V.4 halaman 93).

d. Secara konsep atau menurut buku pedoman pelaksanaan program BOS bahwa pencairan dana BOS dilakukan dua tahap dan pencairan dana BOS diterima pada bulan pertama tiap tahapan. Akan tetapi dalam prakteknya pencairan dana BOS sering mengalami keterlambatan atau tidak tepat waktu. Seperti untuk dana BOS tahun 2007 tahap pertama bulan Januari – Juni 2007 baru dapat cair pada triwulan pertama bahkan akhir semester. Sehingga hal ini menjadikan masalah bagi sekolah sebagai pelaksana kegiatan belajar mengajar, padahal kegiatan belajar dituntut harus berjalan akan tetapi disisi lain dana untuk operasional belum tersedia. Persoalan ini yang sering menjadikan pihak sekolah menjadi pusing karena harus mencarikan dana dengan berbagai upaya agar proses belajar mengajar tetap berjalan lancar.

e. Realisasi Pencairan dana BOS

Penyaluran dana BOS ke-sekolah pada Tahun 2007 khusus untuk Sekolah Menengah Pertama baik

sekolah negeri maupun sekolah swasta sebesar Rp. 220.487.130.000,- (dua ratus dua puluh milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan jumlah 622.845 anak didik. Realisasi pencairan dana BOS dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama bulan Januari - Juni 2007 dan tahap kedua bulan Juli - Desember 2007.

Realisasi pencairan BOS untuk tahap **pertama** adalah pada bulan Januari - Juni 2007 sebesar Rp.110.243.565.000,00 (seratus sepuluh milyar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah siswa sebanyak 622.845 anak didik. Proses pencairan dana dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi Jawa Tengah dengan menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Bank Rakyat Indonesia sebagai rekening penampung yang selanjutnya Bank melakukan penyaluran/pencairan langsung ke- nomor rekening sekolah. Dari total dana BOS sebesar Rp.110.243.365.000,00 dana BOS yang terserap untuk 41 Sekolah Menengah Pertama Negeri sebesar Rp. 5.859.054.000,00 dengan jumlah siswa/siswi 33.102 anak didik

dan telah disalurkan langsung ke-masing-masing sekolah melalui nomor rekening sekolah dengan jumlah yang bervariasi. Hal ini dikarenakan dasar perolehan dana BOS berdasarkan jumlah anak didik yang ada pada masing-masing sekolah. Untuk mengetahui secara lebih detail SMP Negeri penerima dana BOS Kota Semarang dapat dilihat pada tabel V. 9 tersebut di bawah ini.

Tabel V.9
**REALISASI PENCAIRAN DANA BOS DAN
 JUMLAH SISWA SMP NEGERI KOTA SEMARANG**
 Periode pertama : Januari - Juni 2007

No	SEKOLAH	ALAMAT	PENCAIRAN BOS DAN JML SISWA			
			JAN - PEB	MARET	APR - JUNI	SISWA
1	SMP N 1	Rongolawe	61,183,000	30,591,500	91,774,500	1037
2	SMP N 2	Brigjen katamso	56,758,000	28,379,000	85,137,000	962
3	SMP N 3	Jl. Mayjen Panjaitan	61,773,000	30,886,500	92,836,500	1048
4	SMP N 4	Jl Tambak Dalam	54,752,000	27,376,000	82,128,000	928
5	SMP N 5	Jl Sultan Agung	56,227,000	28,113,500	84,340,500	953
6	SMP N 6	Jl. Pattimura No.9	56,404,000	28,202,000	84,783,000	957
7	SMP N 7	Jl. Imam Bonjol	44,486,000	22,243,000	67,083,000	756
8	SMP N 8	Jl Cinde Raya 18	47,790,000	23,895,000	71,685,000	810
9	SMP N 9	Jl Sendanguwo Tmr	55,637,000	27,818,500	83,455,500	943
10	SMP N 10	Jl. Menteri Supeno	41,536,000	20,768,000	62,304,000	704
11	SMP N 11	Jl Karangrejo Tengah	44,427,000	22,213,000	66,640,500	753
12	SMP N 12	Jl Ace 42	45,017,000	22,508,500	67,879,500	765
13	SMP N 13	Jl Lamongan Raya	49,501,000	24,750,000	74,428,500	840
14	SMP N 14	Jl Panda Raya 02	55,696,000	27,848,000	83,544,000	944
15	SMP N 15	Jl Supriyadi 72	56,345,000	28,172,500	84,517,500	955
16	SMP N 16	Jl Raya Ngaliyan	45,725,000	22,862,500	68,587,500	775
17	SMP N 17	Jl. Jangli	40,651,000	20,325,500	60,976,500	689
18	SMP N 18	Jl Purwoyoso I	53,876,000	26,933,500	80,977,500	914
19	SMP N 19	Jl. Abdrmn. Saleh	55,696,000	27,848,000	83,721,000	945
20	SMP N 20	Jl. Gebanganom No.7	46,728,000	23,364,000	70,092,000	792
21	SMP N 21	Jl Karangrejo Raya	55,991,000	27,995,500	83,986,500	949
22	SMP N 22	Jl Raya Gunungpati	46,905,000	23,452,500	70,357,500	795
23	SMP N 23	Jl Raya Mijen	47,495,000	23,747,500	71,242,500	805

24	SMP N 24	Jl Pramuka I	40,946,000	20,473,000	61,419,000	694
25	SMP N 25	Jl Pramuka I	41,418,000	20,709,000	62,127,000	694
26	SMP N 26	Jl Mpu Sendok 11	45,666,000	22,833,000	68,499,000	747
27	SMP N 27	Jl Ngesrep Tmr Ry	50,386,000	25,193,000	75,579,000	854
28	SMP N 28	Jl. Kyai Gilang	46,315,000	23,157,500	69,472,500	785
29	SMP N 29	Jl. Kedungmundu	54,752,000	27,376,000	82,128,000	928
30	SMP N 30	Jl. Amarta No. 2	54,752,000	27,376,000	82,128,000	928

**Sumber : diolah dari Laporan Pertanggung jawaban BOS Kota Smg,
2007**

Lanjutan Tabel V.9

No	SEKOLAH	ALAMAT	PENCAIRAN BOS JML SISWA			
			JAN - PEB	MERET	APR - JUNI	SISWA
31	SMP N 31	Jl. Tambakharjo	39,058,000	19,529,000	58,587,000	662
32	SMP N 32	Jl. Mangunsarkono	43,424,000	21,712,000	65,136,000	736
33	SMP N 33	Jl. Bkt Kencanajaya	46,905,000	23,452,500	70,357,500	795
34	SMP N 34	Jl Tlogomulyo	52,923,000	26,461,500	79,384,500	897
35	SMP N 35	Jl Kuasenrejo	8,968,000	4,484,000	13,452,000	152
36	SMP N 36	Jl. Plampitan 35	52,156,000	26,078,000	78,234,000	884
37	SMP N 37	Jl. Sompok No.43	46,551,000	23,275,500	69,826,500	789
38	SMP N 38	Jl. Bubakan No. 29	26,432,000	13,216,000	39,648,000	448
39	SMP N 39	Jl. Sompok No.43	63,543,000	31,771,500	95,314,500	1077
40	SMP N 40	Jl. Suyudono 130	42,126,000	21,063,000	63,189,000	714
41	SMP N 41	Jl Cepoko Utara	17,641,000	8,820,500	26,461,500	299
	JUMLAH		1.953.018.000	976.509.000	2.929.527.000	33.102

Catatan : Jumlah tahap pertama Jan – Juni , 2007. **Rp. 5.859.054.000,00**
Sumber : diolah dari Laporan Tim BOS Kota Smg, 2007

**Berdasarkan tabel V.9 tersebut di atas,
menunjukkan bahwa realisasi pencairan dana BOS
seluruh SMP Negeri Kota Semarang sebesar
Rp.5.859.054.000,- dana BOS tersebut telah tersalurkan
langsung ke nomor rekening sekolah masing-masing.**

Dari 41 SMP Negeri penerima dana BOS yang menempati renking tertinggi adalah SMP. Negeri 3 yaitu sebesar Rp. 92.836.500,- dengan jumlah siswa 1.048 siswa dan urutan kedua adalah SMP.Negeri 1 yaitu sebesar Rp 91.774.500,00 dengan jumlah siswa 1.037 siswa. Mekanisme pencairan dana BOS dengan model semacam ini sangat efektif dan efisien karena uang dapat diterima secara utuh.

Sedangkan realisasi pencairan dana BOS tahap kedua dilakukan pada bulan Juli - Desember 2007 sebesar Rp.110.243.365.000,- (seratus sepuluh milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah). Dari dana bantuan BOS sebesar Rp. 110.243.565.000,- yang disalurkan untuk 41 SMP Negeri di Kota Semarang sebesar Rp.5.859.054.000,00 atas dasar jumlah siswa/siswi 33.102 siswa, dana BOS tersebut telah disalurkan langsung ke-masing-masing sekolah melalui nomor rekening sekolah dengan jumlah yang bervariasi. Hal ini dikarenakan dasar perolehan dana BOS berdasarkan jumlah anak didik yang ada pada masing-masing sekolah. Untuk mengetahui perincian lebih detail mengenai nama sekolah penerima BOS bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri

Kota Semarang pada tahap kedua dapat dilihat sebagaimana tabel V.10

sebagai berikut :

Tabel V.10
REALISASI PENCAIRAN DANA BOS DAN
JUMLAH SISWA SMP NEGERI KOTA SEMARANG
Periode kedua : Juli – Desember 2007

No	SEKOLAH	ALAMAT	PENCAIRAN BOS		JUMLAH	
			JUL - AGUS	SEPT	OKT - DES	SISWA
1	SMP N 1	Rongolawe	61,183,000	30,591,500	91,774,500	1037
2	SMP N 2	Brigjen katamso	56,758,000	28,379,000	85,137,000	962
3	SMP N 3	Jl. Mayjen Panjaitan	61,773,000	30,886,500	92,836,500	1048
4	SMP N 4	Jl Tambak Dalam No.1	54,752,000	27,376,000	82,128,000	928
5	SMP N 5	Jl Sultan Agung	56,227,000	28,113,500	84,340,500	953
6	SMP N 6	Jl. Pattimura No.9	56,404,000	28,202,000	84,783,000	957
7	SMP N 7	Jl. Imam Bonjol 191 A	44,486,000	22,243,000	67,083,000	756
8	SMP N 8	Jl Cinde Raya 18	47,790,000	23,895,000	71,685,000	810
9	SMP N 9	Jl Sendangguwo Tmr 2	55,637,000	27,818,500	83,455,500	943
10	SMP N 10	Jl. Menteri Supeno 1	41,536,000	20,768,000	62,304,000	704
11	SMP N 11	Jl Karangrejo Tengah	44,427,000	22,213,000	66,640,500	753
12	SMP N 12	Jl Ace 42	45,017,000	22,508,500	67,879,500	765
13	SMP N 13	Jl Lamongan Raya	49,501,000	24,750,000	74,428,500	840
14	SMP N 14	Jl Panda Raya 02	55,696,000	27,848,000	83,544,000	944
15	SMP N 15	Jl Supriyadi 72	56,345,000	28,172,500	84,517,500	955
16	SMP N 16	Jl Raya Ngaliyan	45,725,000	22,862,500	68,587,500	775
17	SMP N 17	Jl. Jangli	40,651,000	20,325,500	60,976,500	689

18	SMP N 18	Jl Purwoyoso I	53,876,000	26,933,500	80,977,500	914
19	SMP N 19	Jl. Abdulrahman Saleh	55,696,000	27,848,000	83,721,000	945
20	SMP N 20	Jl. Gebanganom No.7	46,728,000	23,364,000	70,092,000	792
21	SMP N 21	Jl Karangrejo Raya	55,991,000	27,995,500	83,986,500	949
22	SMP N 22	Jl Raya Gunungpati	46,905,000	23,452,500	70,357,500	795
23	SMP N 23	Jl Raya Mijen	47,495,000	23,747,500	71,242,500	805
24	SMP N 24	Jl Pramuka I	40,946,000	20,473,000	61,419,000	694
25	SMP N 25	Jl Pramuka I	41,418,000	20,473,000	61,419,000	694
26	SMP N 26	Jl Mpu Sendok 11	45,666,000	22,833,000	68,499,000	747
27	SMP N 27	Jl Ngesrep Tmr	50,386,000	25,193,000	75,579,000	854
28	SMP N 28	Jl. Kyai Gilang	46,315,000	23,157,500	69,472,500	785
29	SMP N 29	Jl. Kedungmundu	54,752,000	27,376,000	82,128,000	928
30	SMP N 30	Jl. Amarta No. 2	54,752,000	27,376,000	82,128,000	928

Sumber data : Dinas pendidikan Kota Smg, 2007

Lanjutan Tabel V.10

No	SEKOLAH	ALAMAT	PENCAIRAN BOS		JUMLAH	
			JUL - AGUS	SEPT	OKT - DES	SISWA
31	SMP N 31	Jl. Tambakharjo	39,058,000	19,529,000	58,587,000	662
32	SMP N 32	Jl. Mangunsarkono	43,424,000	21,712,000	65,136,000	736
33	SMP N 33	Jl.Bkt Kencanajaya	46,905,000	23,452,500	70,357,500	795
34	SMP N 34	Jl Tlogomulyo	52,923,000	26,461,500	79,384,500	897
35	SMP N 35	Jl Kuasenrejo	8,968,000	4,484,000	13,452,000	152
36	SMP N 36	Jl. Plampitan 35	52,156,000	26,078,000	78,234,000	884
37	SMP N 37	Jl. Sompok No.43	46,551,000	23,275,500	69,826,500	789
38	SMP N 38	Jl. Bubakan No. 29	26,432,000	13,216,000	39,648,000	448
39	SMP N 39	Jl. Sompok No.43 A	63,543,000	31,771,500	95,314,500	1077
40	SMP N 40	Jl. Suyudono 130	42,126,000	21,063,000	63,189,000	714
41	SMP N 41	Jl Cepoko Utara	17,641,000	8,820,500	26,461,500	299
JUMLAH			1.953.018.000	976.509.000	2.929.527.000	33.102

Catatan : Jumlah tahap kedua Juli - Des, 2007 = Rp. **5.859.054.000,00**

Sumber data : Dinas pendidikan Kota Smg, 2007

Menurut tabel V.10 tersebut di atas, menunjukkan bahwa realisasi pencairan dana BOS untuk tahap kedua semua SMP Negeri Kota Semarang sebesar Rp. 5.859.054.000,00 dengan jumlah

siswa sebanyak 33.102 anak didik dana BOS tersebut telah tersalurkan langsung ke nomor rekening sekolah masing-masing. Model penyaluran langsung ke nomor rekening sekolah lebih efektif dan efisien. Kajian berdasarkan Laporan pertanggung jawaban BOS dari masing-masing SMP Negeri, pada dasarnya pelaksanaan Program BOS oleh SMP Negeri sudah berjalan efektif, hal ini dapat kita lihat indikator kinerja program yakni sudah terealisasinya pencairan dana BOS dan telah diterima oleh seluruh sekolah dengan utuh sesuai jumlah siswa yang diajukan oleh masing-masing sekolah.

Data tersebut di atas telah terungkap masih adanya kelemahan dalam proses penyaluran dana BOS yang belum dapat berjalan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan bahkan dalam prakteknya terjadi keterlambatan pencairan dana tersebut. Seperti dalam buku panduan BOS telah mengatur bahwa penyaluran dana BOS dilakukan secara bertahap yaitu, dana BOS disalurkan tiap periode 3 (tiga) bulan dan dana BOS disalurkan pada awal bulan dari setiap periode tiga bulan.. Kenyataan dana BOS baru dapat dicairkan menjadi 2 tahap, Jan- Juni tahap pertama dan Juli- desember tahap kedua, yang lebih menjadikan permasalahan pencairan dana BOS tersebut jatuh tempo pada akhir triwulan bahkan terjadi pencairan pada akhir smester. Padahal pihak sekolah

untuk menjalankan semua kegiatan operasional sangat tergantung pada dana BOS, kondisi semacam ini menjadikan kacau/pusing pihak sekolah karena dana BOS belum cair di satu sisi kegiatan belajar harus berjalan lebih parah lagi sekolah tidak mempunyai dana cadangan, akibatnya proses belajar mengajar siswa menjadi terganggu.

BAB VI

PENUTUP

C. Kesimpulan

Program BOS yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka penanganan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar hal ini sesuai dengan arah pembangunan bidang pendidikan dalam kurun waktu 2004 - 2009 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat miskin atau kurang mampu yang selama ini dirasakan kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar. Program BOS dilakukan bersamaan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak beberapa tahun terakhir ini yang diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok yang berdampak terhadap kemampuan daya beli masyarakat kurang mampu / miskin, kondisi semacam ini akan dapat menghambat upaya Penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar hal ini juga diperparah dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Sehingga kedua permasalahan tersebut mempunyai dampak terhadap penduduk kurang mampu/miskin akan semakin sulit untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya biaya pendidikan.

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, Pemerintah telah merealokasi sebagian besar dananya ke empat program yaitu bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur perdesaan, dan bantuan langsung tunai. Salah satu program di bidang pendidikan yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan demikian program sangat menarik untuk dikaji karena pendekatan yang berbeda dengan bantuan bagi siswa miskin sebelumnya tetapi diberikan dan dikelola oleh sekolah. Mengingat tujuan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin / tidak mampu. *Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah program BOS berpotensi meningkatkan akses masyarakat miskin /tidak mampu terhadap pendidikan dasar.* Besar populasi adalah jumlah SMP. Negeri Kota Semarang atau sebanyak 41 SMP. Negeri dengan sampel 20 SMP. Negeri yang tersebar di Kota Semarang. Pendekatan yang digunakan adalah diskriptif kawatitatif dengan data yang diperoleh melalui *Indepth interview* atau wawancara. Data kuantitatif yang berbentuk tabel-tabel dan berupa angka-angka yang dikumpulkan akan ditampilkan dilakukan analisis dan pembahasan secara detail, digunakan untuk mendukung analisis secara keseluruhan sebagai pembuktian bagi fenomena-fenomena. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan *kay - informan*. Dalam

pelaksanaan analisis data kualitatif bertujuan pada penggalian makna, penggambaran, penjelasan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing. Lebih lanjut hasil penelitian pelaksanaan program BOS bagi SMP. Negeri Kota Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya pelaksanaan program BOS tahun 2007 oleh lembaga sekolah SMP. Negeri Kota Semarang telah dilaksanakan dengan baik artinya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum Buku Panduan BOS. Meskipun demikian hasil penelitian telah mengungkap masih terdapat beberapa kelemahan yang kiranya perlu mendapatkan perhatian bagi Kepala Sekolah sebagai penerima sekaligus pengelola dana BOS. Hasil evaluasi ternyata BOS telah terungkap bahwa dana BOS tahun 2007 hampir semua 41 SMP Negeri Kota Semarang sebesar Rp. 22.134.027.000,- Dari jumlah tersebut ternyata yang paling besar adalah (30%) untuk pembayaran tenaga honorer /GTT/ PTT, Tenaga Harlap, (25%) untuk belanja barang jasa dan (20%). untuk kegiatan belajar mengajar, (15%). kegiatan kesiswaan dan (10%) dan pemeliharaan gedung.

2. Cakupan dana BOS bagi Siswa Keluarga Miskin:

Berdasarkan kajian data siswa yang disusun oleh sekolah, RAPBS dan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan BOS

seluruh SMP Negeri Kota Semarang telah terungkap terdapat jumlah siswa/siswi keluarga miskin berkisar 20 % - 33% dari total siswa. Dari totalitas siswa keluarga miskin baru dapat terlayani sekitar 20% - 25% hal ini disebabkan dana BOS belum dapat menjangkau bagi seluruh siswa miskin. Hal ini juga diperkuat hasil wawancara dengan beberapa Kepala Sekolah bahwa meskipun dana BOS belum cukup untuk seluruh operasional sekolah, akan tetapi sudah sangat membantu kelancaran operasional sekolah, bagaimanapun kenyataan dana BOS memberikan kontribusi sekolah cukup besar jika dibandingkan dengan bantuan APBD yang relatif kecil. Bentuk layanan terhadap siswa miskin masih terbatas pada pemberian bea siswa (khusus) yaitu pembebasan biaya SPP (Rp. 55.000 – Rp. 60.000) dan Sumbangan BP.3 yang besarnya ditentukan oleh komite sekolah. Dan sampai saat sekolah belum dapat memikirkan bantuan transportasi bagi siswa keluarga miskin karena terbatasnya dana yang tersedia untuk operasional oleh sekolah. Berdasarkan hasil penelitian dokumentasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun 2007 dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Sekolah tahun

2007 diantaranya SMP. Negeri 4, SMP. Negeri 9, SMP. Negeri 21, SMP. Negeri 34 dan SMP. Negeri 3 Kota Semarang yang menjadi sampel penelitian, dari dokumentasi tersebut setelah kami lakukan kajian ternyata masing-masing sekolah tersebut sudah mampu membebaskan bagi siswa/siswi yang tidak mampu/miskin. Dari kelima SMP. Negeri 4 yang menjadi sampel tersebut mempunyai potensi anggaran untuk membebaskan siswa/siswi tidak mampu/miskin yang bervariasi yaitu antara 15 % - 20 % dari jumlah siswa yang ada atau berkisar 200 siswa tiap sekolah Bentuk layanan oleh sekolah kepada siswa miskin masih terbatas pada pembebasan iuran Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) dan iuran BP.3 yang ditetapkan oleh komite sekolah.

3. Cakupan dana BOS bagi Siswa Keluarga Tidak Mampu
Cakupan dana BOS terhadap Layanan Siswa tidak mampu tidak jauh berbeda dengan siswa miskin. Berdasarkan kajian data siswa yang disusun oleh sekolah telah terungkap masih adanya siswa/siswi dari keluarga tidak mampu yang belum memperoleh layanan pendidikan dasar secara memadai. Hasil

kajian RAPBS dan Laporan Pertanggungjawaban BOS dari total siswa 29.943 siswa masih sekitar 8% atau 2.386 siswa tidak mampu. Dari jumlah 2.386 siswa tersebut ternyata baru 1365 siswa yang memperoleh layanan pendidikan atau sekitar 57% sedangkan sisanya 1021 anak atau sekitar 43% belum mendapatkan layanan pendidikan dari pihak sekolah. Hal ini disebabkan dana BOS yang diterima oleh sekolah belum mampu menjangkau untuk memberikan layanan siswa tidak mampu secara keseluruhan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP.Negeri 9 dan SMP Negeri 4 Kota Semarang yang menjadi sampel dalam penelitian ini, memberikan tanggapan bahwa program BOS ternyata dapat membebaskan biaya pendidikan bagi siswa/siswi yang tidak mampu. Bentuk layanan oleh sekolah kepada siswa tidak mampu masih terbatas pada pemberian keringanan atau potongan 50 % dari Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) yaitu dari Rp. 60.000,00 menjadi RP. 30.000,00 selama menjadi siswa di sekolah.

4. Manfaat dan Dampak Program BOS

Berdasarkan hasil kajian laporan pertanggungjawaban keuangan BOS dari 41 SMP. Negeri di Kota Semarang telah terungkap Penggunaan dana BOS oleh Sekolah belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Pedoman /Penduan BOS antara lain ; pemberian transportasi siswa miskin belum dilaksanakan, untuk transportasi lomba guru, untuk bayar tenaga harlep yang sudah dibiayai Pemkot, Penerimaan Murid Bari masih dikenakan berbagai pungutan, Rehab gedung, Pembelian peralatan yang tidak terkait dengan proses pendidikan komputer dan Perbaikan kecil gedung sekolah.

Untuk mengetahui dampak program BOS peneliti melakukan pengumpulan data kuantitatif hasilnya secara umum bahwa BOS dapat *memperkuat kemampuan sekolah* dalam memberikan materi pembelajaran dan kegiatan tambahan kepada siswa dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Dari 41 SMP. Negeri yang menjadi sampel menyatakan bahwa, dana BOS meningkatkan jumlah penerimaan dana sekolah, bagi yang muridnya banyak jumlah penerimaan sangat signifikan, meskipun penambahan

penerimaan tiap sekolah berbeda. Dalam banyak hal BOS mengurangi keterbatasan anggaran sekolah dan dengan demikian dapat *meningkatkan kapasitas sekolah untuk memenuhi biaya operasional sekolah*. Oleh karena itu beberapa komponen yang semula dibebankan orang tua siswa melalui SPP menjadi berkurang. Dampak yang dirasakan oleh sekolah dengan antara lain : adanya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana pendidikan hal ini akan dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar siswa, dampak yang dirasakan oleh siswa adalah adanya beban biaya sekolah menjadi lebih berkurang, seperti di Semarang secara umum untuk biaya SPP tiap anak sebelum ada program BOS rata-rata berkisar Rp. 90.000,- setelah adanya BOS berkurang menjadi Rp. 55.000,- sehingga mengurangi beban biaya tiap siswa Rp. 35.000,- atau berkisar 30% - 35%. Sedangkan dampak lain adalah dengan adanya program BOS, alokasi sekolah untuk bantuan khusus bagi siswa miskin atau tidak mampu cukup besar yakni berkisar rata-rata 15 % - 20 % dari jumlah

siswa keseluruhan. Berdasarkan hasil evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BOS dari sekolah yang menjadi sampel dan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP. Negeri 4 Semarang yang menyatakan bahwa mulai tahun ajaran 2006 / 2007 Sekolah mengalokasikan bantuan khusus bagi siswa tidak/kurang mampu berkisar 20% dari jumlah siswa sebanyak 928 anak yaitu sebanyak 200 anak tidak/kurang mampu yang diberikan dalam bentuk bea siswa bebas dari segala biaya sekolah (gratis, kecuali biaya tour/wisata siswa.).

5. Potensi BOS dalam Perluasan Akses Pendidikan.

Meskipun belum semua siswa miskin /tidak mampu memperoleh layanan pendidikan secara memadai yang berasal dari dana BOS, akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua siswa, termasuk siswa miskin/tidak mampu mendapat manfaat dari dana BOS. Oleh karena besarnya/luasnya cakupan sasaran Program BOS dan kecenderungan adanya kepastian bahwa siswa miskin akan mendapatkan manfaat berupa biaya

sekolah akan lebih murah. Hal ini juga diperkuat hasil wawancara dengan beberapa Kepala Sekolah yang diperkuat dengan pernyataan orang tua siswa yang anaknya menerima BOS meskipun semua siswa menerima manfaat Program BOS, akan lebih tepat jika sekolah memberikan manfaat tambahan bagi siswa miskin. Berdasarkan kajian laporan pertanggungjawaban dan RAPBS ternyata dana BOS telah memberikan kontribusi terhadap APBD Kota Semarang dalam bidang pendidikan sebesar 27 % selajutnya dana APBD sendiri memberikan kontribusi dana pendidikan sebesar 31 % dan orang tua wali murid memberikan sumbangan sebesar 42%. Dengan demikian telah dapat kita simpulkan bahwa BOS ternyata telah memberikan kontribusi pendidikan yang cukup signifikan, sehingga keberadaan program BOS ternyata dapat mengurangi beban orang tua wali murid sebesar 27% dari total anggaran. Sedangkan hasil kajian berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan BOS dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) SMP. Negeri

Kota Semarang, dari jumlah anggaran pendidikan SMP. Negeri Kota Semarang tahun 2007 ternyata dana BOS telah dapat memberikan kontribusi pendidikan sebesar 31 %, sumber dana yang berasal dari masyarakat atau orang tua/wali murid yang dihimpun melalui komite sekolah telah memberikan kontribusi pendidikan sebesar 42 % dan dana yang bersumber dari APBD Kota Semarang sebesar 27 %. Ketiga sumber dana tersebut ternyata yang paling besar adalah berasal dari sumbangan orang tua murid. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa orang tua/wali murid masih memegang peranan yang sangat penting terhadap kelancaran dan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Semarang. Kita menyadari sampai sekarang pemerintah belum mampu mengalokasikan anggaran bagi pendidikan secara memadai.

6. Hambatan pelaksanaan BOS:

Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan BOS antara lain ;
Pencairan dana BOS sering terlambat atau tidak tepat waktu. Sesuai

dengan ketentuan pencairan dana BOS tiap triwulan dan pencairan dapat dicairkan pada awal bulan triwulan, tapi yang terjadi untuk dana BOS tahun 2007. Pencairan dilakukan 2 tahap yaitu tahap pertama bulan Januari – Juni 2007 dan tahap kedua Juli- Desember 2007. Hal ini menjadi masalah bagi sekolah karena akan mengganggu pelaksana kegiatan belajar mengajar, padahal kegiatan belajar dituntut harus berjalan akan tetapi disisi lain dana untuk operasional belum tersedia. Persoalan ini yang sering menjadikan pihak sekolah menjadi pusing karena harus mencarikan dana dengan berbagai upaya agar proses belajar mengajar tetap berjalan lancar.

Hasil kajian berdasarkan laporan keuangan BOS dari masing-masing sekolah dan hasil wawancara beberapa Kepala SMP.N dan Tim Manajemen ternyata terdapat kecenderungan oleh Kepala Sekolah dalam penyusunan RAPBS maupun dalam pengelolaan dana BOS hampir orang tua murid tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan RAPBS, sedangkan komite sekolah hanya bersifat formalitas untuk membubuhkan tanda tangan terhadap RAPBS yang telah disusun oleh sekolah sehingga fungsi kontrol msih sangat lemah.

D. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut ini akan disampaikan beberapa rekomendasi yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan pelaksanaan program BOS khususnya dalam rangka mencapai tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program BOS SMP. Negeri di Kota Semarang sebagai berikut :

1. Searah dengan tujuan program BOS yaitu dalam rangka pembebasan siswa miskin/tidak mampu untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas, hendaknya pemanfaatan dana BOS benar-benar diarahkan untuk operasional sekolah yang menunjang kelancaran proses belajar sesuai dengan buku Panduan BOS yang ditetapkan oleh Pemerintah. Karena komitmen sekolah sebagai penerima sekaligus pengelola BOS sangat menentukan keberhasilan dari pada program BOS baik dalam lingkup internal sekolah maupun daerah.
2. Sumber dana sekolah ternyata berasal dari, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dana BOS dan Sumbangan orang tua siswa. Dari ketiga komponen tersebut ternyata biaya operasional sekolah masih sangat tergantung pada sumbangan orang tua murid maupun BOS sedangkan dukungan APBD masih relatif kecil. Oleh karena itu hendaknya dalam pengelolaan dana dengan melibatkan

orang tua (komite) serta hendaknya dilakukan secara transparan melalui laporan pertanggungjawaban publik dengan demikian fungsi control akan dapat berjalan efektif.

3. Berdasarkan kajian data siswa yang disusun oleh sekolah, realisasi RAPBS dan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan BOS seluruh SMP Negeri Kota Semarang telah terungkap terdapat jumlah siswa/siswi keluarga miskin berkisar 20 % - 33% dari total siswa. Dari totalitas siswa keluarga miskin baru dapat terlayani sekitar 20% - 25%. Sedangkan untuk siswa tidak mampu dari total siswa 29.943 siswa masih sekitar 8% atau 2.386 siswa tidak mampu. Dari jumlah tersebut ternyata baru 1365 siswa yang memperoleh layanan pendidikan atau sekitar 57% sedangkan sisanya 1021 anak atau sekitar 43% belum mendapatkan layanan pendidikan dari pihak sekolah. Hal ini disebabkan dana BOS belum dapat menjangkau bagi seluruh siswa miskin. Sedangkan untuk siswa tidak mampu. Oleh karena itu agar penuntasan wajib belajar sembilan tahun dapat berhasil dengan optimal maka hendaknya program BOS terus dilaksanakan dan secara bertahap perlu adanya kucuran dana BOS bagi sekolah dasar secara memadai.
4. Agar program BOS secara efektif dapat mendukung kelancaran proses belajar mengajar hendaknya pencairan dana BOS oleh

Pemerintah dilakukan secara tepat waktu yaitu dilakukan tiap triwulan dan pencairan dana BOS dilakukan pada awal bulan. Hal ini dimaksudkan agar kebutuhan operasional sekolah tidak mengalami hambatan sehingga kegiatan belajar mengajar akan dapat berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1997, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta.
- Badjuri Abdul Kahar dan Teguh Yuwono, 2002, *Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bungin Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Djudju Sudjana, 2006, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*, Rosdakarya.
- Dwidjowijoto Riant Nugroho, 2006, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta.
- Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005, *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*, Edisi Revisi, PT Rosdakarya, Bandung.
- Guba E Dan Lincoln, 1981, *Efectiffe Evaluation*, San Fransisco, Jossey Bass Publisher.
- Gutama, 2006, *Kebijakan dan Implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dalam Peningkatan Kecerdasan Anak Usia Dini*, Makalah.
- Islamy, M. Irfan, 1994, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Cetakan Ketujuh : Bumi Aksara, Jakarta.
- Majalah Diknas Provinsi Jawa Tengah, 2007 Pelaksanaan BOS di Jawa Tengah
- Matthew B Miles dan A Michael Huberman, Tjetjep Rohendi Rohidi, 1992, *Analisis Data Kualitatif (Qualitative Data Anallysis – Sage Publications,Inc)*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Moleong. Lexy. J. 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Prosending Men. PAN, 2006 “ Reformasi Birokrasi dalam rangaka menghadai Daya Saing Dalam Era Global “
- Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono R, 1997, *Statistika Untuk Penelitian*, bandung, Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar, 2004, *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Surjadi, Ace, 2006, *Kebijakan Pemerintah di bidang Bantuan BOS Pendidikan Dasar* Makalah, Jakarta.
- Susenas, 2005 “Statistik Dalam Angka “ Kota Semarang
- Tangkllisan Hessel Nogi S, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*, Lukman

Offset, Yogyakarta.

- UNESCO, 2002, *Human Development Index*, Indeks Pembangunan Manusia.
- Utomo, Warsito, 2006, *Administrasi Publik Baru Indonesia, Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*, Edisi/Cetakan I, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Wawasan, Tanggal 20 Juni 2007 Menanggapi Pelaksanaan BOS di Kota Semarang.
- Wibowo Samudra, Cs, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- William N Dunn, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gajah Mada University Press, Jogjakarta.
- Winarno, Budi, 2004, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Edisi/Cetakan Kedua, Media Pressindo, Jogjakarta.
- ,2001, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua,, Bumi Aksara, Jakarta.
- ,2003, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta.
- ,2004, *Buletin PAUD, Jurnal Ilmiah Anak Usia Dini*, Edisi Khusus.
- ,2005, *Menu Pembelajaran Generik Program Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta.
- ,2006, *Data*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- ,2006, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang – Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*, PT Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta.
- ,2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Cakra Surakarta, Surakarta.
- ,2007, *Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (RAD-PUS) Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2009*, Forum PUS, Dinas P dan K Jateng, Edisi Revisi.
- .-----,2006, *Data*, Dinas Pendidikan Kota Semarang.
- .-----,2007, *Pedoman Program BOS Pendidikan Dasar*, Jakarta.

